

**ANALISIS PERENCANAAN AUDIT ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA KANTOR AKUNTAN PUBLIK (KAP) XXX**

TUGAS AKHIR



Disusun Oleh:

DEBY SHINTA ELVIA PUTRI

1602130017

**JURUSAN D3 AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA DARMAJAYA
BANDAR LAMPUNG**

2019

**PERENCANAAN AUDIT ATAS LAPORAN KEUANGAN PADA KANTOR
AKUNTAN PUBLIK (KAP) XXX**

TUGAS AKHIR

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar AHLI MADYA



Disusun Oleh:

Deby Shinta Elvia Putri

1602130017

JURUSAN D3 AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA DARMAJAYA

BANDAR LAMPUNG

2019



PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini, menyatakan bahwa Tugas Akhir (TA) yang saya ajukan ini adalah hasil karya saya sendiri, tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar ahli madya, disuatu perguruan tinggi atau karya yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali yang secara tertulis di tunjukan dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Karya ini adalah milik saya dan menjadi pertanggungjawaban saya sepenuhnya.

Bandar Lampung, 13 Oktober 2019

Deby Shinta Elvia Putri
NPM. 1602130017

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Tugas Akhir : Analisis Perencanaan Audit Atas Laporan
Keuangan Pada Kantor Akuntan Publik (KAP)
XXX

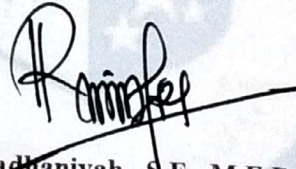
Nama : Deby Shinta Elvia Putri

Nomor Pokok Mahasiswa : 1602130017

Jurusan : D3 Akuntansi

DISETUJUI OLEH

Dosen Pembimbing



Rieka Ramadhaniyah., S.E., M.E.Dev

NIK. 1144090

Ketua Jurusan Akuntansi



Anik Ibrahim., S.E., Msc

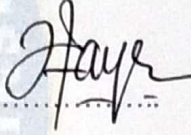
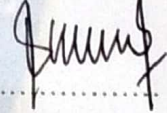
NIK. 01170305

HALAMAN PENGESAHAN


Telah diselenggarakan sidang **ANALISIS PERENCANAAN AUDIT ATAS LAPORAN KEUANGAN PADA KANTOR AKUNTAN PUBLIK (KAP) XXX** untuk memenuhi sebagai persyaratan akademik guna memperoleh gelar **AHLI MADYA**, bagi mahasiswa :

Nama Mahasiswa : Deby Shinta Elvia Putri
No. Pokok Mahasiswa : 16021300217
Program Studi : D3 Akuntansi

Dan telah dinyatakan **LULUS** oleh Dewan Penguji yang terdiri dari :

<u>Nama</u>	<u>Status</u>	<u>TandaTangan</u>
1. Nolita Yeni Siregar.,S.E.,Akt., M.S.Ak.,CA	Ketua Sidang	
2. Reva Meiliana., S.E., M.Acc, Akt	Anggota	

Dekan Fakultas Ekonomi & Bisnis
IBI DARMAJAYA


Dr. Faurani I Santi Singagerda, S.E.,M.Sc
NIK. 30040419

Tanggal Lulus Ujian Tugas Akhir : 13 September 2019

RIWAYAT HIDUP

1. Identitas

- a. Nama Lengkap : Deby Shinta Elvia Putri
- b. Tempat/ Tanggal Lahir : Bandar Lampung, 13 Mei 1997
- c. Agama : Islam
- d. Alamat : Jalan Karet Gang Senen 1 No. 54
- e. Kewarganegaraan : Indonesia
- f. E-mail : debyshintaep@gmail.com
- g. HP : 0896-2096-1225

2. Riwayat Pendidikan

- a. Sekolah Dasar : SD Negeri 2 Sumberejo, Bandar Lampung
- b. Sekolah Menengah Pertama : SMP Negeri 14 Bandar Lampung
- c. Sekolah Menengah Atas : SMA Negeri 7 Bandar Lampung
- d. Perguruan Tinggi : D3 Akuntansi IIB Darmajaya
Bandar Lampung.

Bandar Lampung, 13 Oktober 2019

Deby Shinta Elvia Putri

NPM.1602130017

PRAKATA

Segala yang kuraih adalah kehendak Allah SWT dan bukti kasih sayang dari orang – orang yang menyayangiku. Dengan mengucap syukur kepada Allah SWT, segala ketulusan dan kerendahan hati kupersembahkan karya ilmiah ini untuk :

1. Tuhan Yang Maha Esa, yang dengan izin dan kuasa-Nya mampu menggantikan seluruh kesabaran dengan sesuatu yang sangat berharga.
2. Kedua orang tua tercinta, Bapak Surono dan Ibu Suharyani, yang telah menjadi sumber kekuatan penulis dan selalu memberikan semangat, dukungan dan doa yang tiada hentinya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini.
3. Adik-adikku tersayang, Arsita Dewi Elvia Putri dan Dimas Firmansyah, yang selalu mengisi hari-hariku, semoga kakakmu ini bisa menjadi contoh bagi kalian.
4. Seluruh keluarga yang telah menyemangati, memberikan banyak dukungan dan doa dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini, semoga penulis dapat menjadi kebanggaan bagi keluarga.
5. Ir. Firmansyah Y. Alfian, MBA., MSc selaku Rektor Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya.
6. Anik Irawati, S.E., MSc selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya.
7. Rieka Ramadhaniah., S.E., M.E.Dev selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing penulis, memberikan masukan, dan nasihat kepada penulis selama ini.
8. Seluruh dosen pengajar selama 3 tahun perkuliahan dan staff administrasi Insitut Informatika dan Bisnis Darmajaya.
9. Sahabat terbaik, Dessy Nurma Hesti, yang telah meluangkan banyak waktunya untuk menemani penulis dalam keadaan apapun.

10. Teman-teman D3 Akuntansi angkatan 2016 Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya, kalian terbaik. *See you on top!*
11. Pihak lain yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu pada kesempatan ini yang turut mengambil bagian dalam penyelesaian Tugas Akhir ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Tugas Akhir ini, masih terdapat berbagai kekeliruan, karena itu penulis mengharapkan saran ataupun kritikan yang membangun demi penyempurnaan tugas akhir ini.

Semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semua yang membutuhkan.

MOTTO

**“Tiada Perjuangan Tanpa Pemikiran dan Tiada
Guna Sebuah Pemikiran Tanpa Perjuangan”**

-Deby Shinta Elvia Putri-

ABSTRAK
ANALISIS PERENCANAAN AUDIT ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA KANTOR AKUNTAN PUBLIK XXX

Oleh
DEBY SHINTA ELVIA PUTRI
1602130017

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kesesuaian perencanaan audit laporan keuangan atas klien pada KAP XXX berdasarkan desain perencanaan dan SPAP. Dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Sampel yang diambil dalam penelitian ini yaitu Koperasi Simpan Pinjam yang diaudit oleh KAP XXX pada tahun 2019. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perencanaan audit atas laporan keuangan pada Koperasi Simpan Pinjam sudah sesuai dengan desain perencanaan audit pada KAP XXX, dan desain perencanaan audit pada KAP XXX sudah sesuai dengan Standar Profesional Akuntan Publik.

Kata kunci: Perencanaan Audit, Standar Profesional Akuntan Publik.

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
RIWAYAT HIDUP	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
MOTTO	viii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
PRAKATA	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
DAFTAR PUSTAKA	xviii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Ruang Lingkup Masalah	5

1.4 Tujuan Penelitian.....	6
1.5 Manfaat Penelitian.....	6
1.6 Sistematika Penulisan.....	7

BAB II LANDASAN TEORI

2.1 Audit.....	8
2.1.1 Pengertian Audit.....	8
2.1.2 Jenis-Jenis Audit.....	11
2.1.3 Tujuan Audit.....	14
2.2 Audit Laporan Keuangan	15
2.2.1 Tujuan Audit Laporan Keuangan	15
2.2.2 Tahap-Tahap Audit Atas Laporan Keuangan.....	17
2.3 Perencanaan Audit Laporan Keuangan	19
2.4 Tahap-Tahap Perencanaan Audit Laporan Keuangan.....	20
2.5 Kerangka Pemikiran.....	23
2.6 Penelitian Terdahulu.....	24

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian.	25
3.2 Metode Pengumpulan Data	26
3.3 Analisis Data	26

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian	27
4.1.1 Profile Singkat KAP XXX	27

4.1.2 Visi dan Misi KAP XXX.....	27
4.1.3 Stuktur Organisasi KAP XXX	28
4.2 Pembahasan Penelitian	28
4.2.1 Desain Perencanaan Audit Atas Laporan Keuangan Pada KAP XXX .	29
4.2.2 Membandingkan Desain Perencanaan Audit Dengan Operasional.....	46
4.2.3 Membandingkan Perencanaan Audit KAP XXX dengan SPAP.....	60

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan.....	73
5.2 Keterbatasan Penelitian	73
5.3 Saran.....	73

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

	Hal
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran	23
Gambar 4.1 Ringkasan Pembahasan	59
Gambar 4.2 Ringkasan Pembahasan	71

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	24
Tabel 4.1 Perbandingan Perencanaan Audit Antara Operasional Koperasi Simpan Pinjam dan KAP	47
Tabel 4.2 Perbandingan Perencanaan Audit Pada KAP dan SPAP	60

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada masa ini, perkembangan usaha di Indonesia memberikan dampak bagi peningkatan di dalam usaha perusahaan. Dengan semakin kompleknya kegiatan perusahaan tersebut, perusahaan dituntut untuk mengembangkan kemampuan dalam bersaingnya (Dewi dan Widasedana, 2015). Seorang manajemen harus dapat memastikan bahwa laporan keuangan yang disajikan telah terbebas dari salah saji material, oleh karena itu perusahaan membutuhkan jasa akuntan publik karena laporan keuangan yang teruji secara independen dapat menunjang pembuatan keputusan dalam melakukan bisnis (Hidayat, 2011).

Laporan audit yang berisi opini dari akuntan publik diharapkan agar dapat memberikan kepercayaan hingga tingkat *reasonable assurance*. Opini tersebut dapat diberikan atas hasil penilaian atas pelaksanaan audit yang telah dilakukan oleh akuntan publik terhadap suatu perusahaan. Tetapi pada saat ini, banyak akuntan publik yang memberikan opini yang salah sehingga pelaksanaan audit dianggap gagal serta merugikan berbagai pihak.

Kegagalan dalam pelaksanaan audit ini terjadi pada kasus audit indosat pada tahun 2012. Pada kasus ini, laporan keuangan PT Indosat Tbk yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantoro, Sungkoro dan Surja yang merupakan afiliasi dari Ernest and Young Global menyajikan laporan audit yang salah. Di tahun 2017, *Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB)* melalui situs resminya menyatakan adanya label penyimpangan pemeriksaan dan memberikan denda sebesar US\$ 1Juta atau sekitar Rp 13 Milyar kepada KAP Purwantoro, Sungkoro dan Surja yang merupakan afiliasi dari Ernest and Young Global. Sanksi ini diberikan kepada KAP Purwantoro, Sungkoro dan Surja karena telah gagal dalam melaksanakan audit dengan memberikan opini wajar tanpa pengecualian terhadap laporan PT Indosat Tbk untuk laporan yang berakhir pada 31 Desember 2011. Opini tersebut diberikan tanpa adanya bukti yang memadai.

Selain itu, alasan lain yang muncul karena audit tergesa-gesa didalam melakukan penyajian laporan keuangan audit kepada PT Indosat Tbk, sehingga firma dan mitra yang bertugas telah lalai dalam mengerjakan tugas dasarnya untuk menyajikan bukti audit yang memadai.

Pada kasus di atas terjadi karena ketidakmampuan auditor dalam melaksanakan audit secara tepat, sehingga laporan audit yang dikeluarkan tidak terbebas dari salah saji yang material serta memengaruhi kualitas audit yang dihasilkan (Knechel, 2013). Ada banyak variable yang dapat mengukur kualitas audit, tetapi tidak ada definisi atau ukuran audit yang duterima secara umum.

Menurut Handayani (2009) cara meningkatkan kualitas audit adalah dengan meningkatkan pendidikan professional auditor, mempertahankan sikap independensi, kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama, perencanaan pekerjaan audit, bukti audit yang cukup dan kompeten, dan melakukan audit kinerja yang meliputi ekonomi efesiensi perusahaan.

Perencanaan audit adalah tahapan yang penting bagi auditor dalam melaksanakan audit, baik dalam melakukan audit keuangan, audit kinerja maupun audit investigatif. Dalam melakukan audit kinerja, auditor harus menyusun rencana audit. Rencana audit bertujuan untuk menjamin bahwa tujuan audit tercapai secara berkualitas, ekonomi, efisien dan efektif (Hasanah, 2013). Untuk menghasilkan audit yang efisien dan efektif membutuhkan perencanaan audit yang baik sebelum melakukan audit. Kegagalan dalam merencanakan penugasan audit secara tepat dapat menyebabkan penyajian laporan yang keliru atau audit menjadi tidak efisien dan efektif (Utami,2013). Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa tahap perencanaan audit adalah tahapan yang harus mendapatkan perhatian yang serius dari auditor.

Kasus kegagalan audit yang dilakukan oleh KAP Purwantoro, Sungkoro dan Surja kepada PT Indosat Tbk yang telah disebutkan di atas terjadi karena kurangnya pengungkapan bukti audit yang cukup sehingga akan memengaruhi opini yang diberikan. Selain bukti audit yang tidak tepat dan tidak cukup, alasan lainnya yaitu ketidakcermatan dalam penyajian laporan keuangan auditan sebuah perusahaan.

Berdasarkan alasan terjadinya kasus tersebut, dapat disimpulkan bahwa kegagalan audit terjadi karena bukti yang tidak tepat dan tidak cukup, kesalahan waktu, dan kesalahan dalam penentuan tim. Ketiga alasan ini adalah bagian dari tahapan perencanaan audit yang harus dibuat serta di dokumentasikan secara tepat.

Analisa di atas didukung oleh pendapat Arens (2010) tentang perencanaan audit harus dilakukan dengan sebaik-baiknya agar auditor mendapatkan bukti kompeten yang cukup, mengefesiesikan serta menekan biaya audit, dan menghindari kesalahpahaman dengan klien. Perencanaan merupakan suatu tahap yang tidak terpisah dari tahap audit lainnya, tetapi merupakan suatu proses yang berkelanjutan dan berulang yang dimulai saat setelah penyelesaian audit periode sebelumnya dan berlanjut sampai penyelesaian perikatan audit periode ini. Pada Standar Audit (SA) 300 menyatakan bahwa prosedur audit lainnya yang telah direncanakan harus dilaksanakan supaya perikatan tersebut memenuhi ketentuan yang disyaratkan oleh Standar Audit (SA) (Rachmawati *et al.*, 2016). Dalam SPAP SA 300 (2013:2) menyebutkan bahwa perencanaan audit melibatkan penetapan strategi audit secara menyeluruh yang menetapkan ruang lingkup, waktu dan arah audit, serta memberikan arahan dalam mengembangkan rencana audit.

Berdasarkan pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa perencanaan audit adalah suatu proses yang sangat penting dalam menentukan proses audit lanjutan sampai proses pelaporan. Kesalahan pada tahap perencanaan audit akan mengakibatkan kegagalan dalam mencapai tujuan audit yang telah ditentukan. Oleh sebab itu, perencanaan audit adalah tahapan atau proses yang harus mendapatkan perhatian serius dari auditor.

Penelitian ini adalah pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh Pradipto (2010) dan Ginting (2017). Pengembangan penelitian ini terdapat pada objek penelitian. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu terdapat pada objek penelitiannya. Seperti yang dilakukan oleh Agustinus Adhi Yudho Pradipto (2010) yang melakukan penelitian tentang Analisis Perencanaan Audit Laporan Keuangan Pada Kantor Akuntan Publik (KAP) Joachim Sulisty

dan Rekan. Hasil penelitian pada penelitian ini menyatakan bahwa perencanaan audit laporan keuangan pada KAP Joachim Sulistyو dan rekan telah memadai dan secara tertulis telah sesuai dengan perencanaan audit laporan keuangan menurut SPAP (Pradipto, 2010). Perbedaan dalam penelitian ini terletak pada objek penelitiannya yaitu pada KAP XXX.

Penelitian lainnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Evan Hadinata Ginting (2017) melakukan penelitian tentang Analisa Perencanaan Audit Atas Laporan Keuangan Pada Kantor Akuntan Publik (KAP) Richard Risambessy dan Rekan. Perbedaan dalam penelitian ini terletak pada objek penelitiannya yaitu pada KAP XXX.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian untuk mencari tahu fenomena proses perencanaan audit yang berada di lapangan. Selain itu, pentingnya proses perencanaan dapat dijadikan alasan bahwa audit yang tepat akan sangat mempengaruhi dalam pengambilan keputusan prosedur audit yang akan digunakan pada tahap pelaksanaan audit. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “ Analisa Perencanaan Audit Atas Laporan Keuangan Pada KAP XXX”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah perencanaan audit atas laporan keuangan yang dilakukan pada KAP XXX telah sesuai dengan desain perencanaan audit atas laporan keuangan KAP XXX?
2. Bagaimana perencanaan audit atas laporan keuangan yang ada pada KAP XXX berdasarkan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP)?

1.3 Ruang Lingkup Masalah

Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan diatas, maka ruang lingkup dalam penelitian ini yaitu:

1. Menganalisis kesesuaian perencanaan audit atas laporan keuangan KAP XXX terhadap desain perencanaan audit atas laporan keuangan KAP XXX.
2. Menganalisis kesesuaian perencanaan audit atas laporan keuangan KAP XXX terhadap Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP).

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menganalisis dan mengetahui kesesuaian antara perencanaan audit atas laporan keuangan pada KAP XXX dengan desain perencanaan audit atas laporan keuangan KAP XXX.
2. Menganalisis dan mengetahui kesesuaian antara perencanaan audit atas laporan keuangan KAP XXX berdasarkan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP).

1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Pembaca, dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai perencanaan audit atas laporan keuangan dan dapat membandingkan antara teori audit dengan penerapannya.
2. Bagi Perusahaan, dapat memberikan informasi sebagai bahan evaluasi apakah penerapan perencanaan audit sudah sesuai dengan standar atau belum.
3. Bagi Peneliti, dapat menambah pengetahuan di bidang audit khususnya perencanaan audit atas laporan keuangan dan dapat membandingkan antara teori audit dengan penerapannya.
4. Bagi Peneliti Selanjutnya, dapat dijadikan sebagai masukan dan tambahan referensi untuk bahan pengembangan penelitian selanjutnya.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini akan menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, ruang lingkup masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini akan menguraikan tentang teori-teori dasar yang berhubungan dengan audit laporan keuangan yang mendukung peneliti untuk melakukan penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini akan menerangkan tentang metode-metode pendekatan dalam menyelesaikan permasalahan yang telah dinyatakan dalam rumusan masalah.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan menjelaskan tentang hasil dari analisis dan pembahasan penelitian. Analisis data dan penjelasannya akan berpedoman dengan teori-teori yang dikemukakan pada Bab II.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang telah peneliti lakukan serta saran-saran yang dianggap penting dan diperlukan.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Audit

2.1.1 Pengertian Audit

Audit adalah suatu ilmu yang dapat digunakan untuk melakukan penilaian terhadap pengendalian intern yang bertujuan untuk memberikan pengamanan agar tidak terjadinya penyelewengan dan ketidakwajaran yang dilakukan oleh perusahaan.

Berikut ini pengertian audit menurut beberapa ahli:

Menurut Agoes (2012:4) dapat didefinisikan bahwa:

Suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis, oleh pihak yang independen, terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen, beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut.

Menurut Mulyadi (2014:9) dapat didefinisikan bahwa:

Suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan.

Menurut Alvin *et al* (2015:2) dapat didefinisikan bahwa:

Audit adalah suatu proses pengumpulan dan evaluasi bukti mengenai informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi yang di dapat dengan kriteria yang telah ditetapkan.

Dari beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa:

Audit merupakan suatu proses sistematis yang digunakan untuk memperoleh serta mengevaluasi bukti terhadap laporan keuangan, pengendalian intern dan catatan akuntansi dari suatu perusahaan dengan tujuan untuk memberikan pendapat

mengenai kewajaran atas laporan keuangan tersebut berdasarkan bukti yang diperoleh berdasarkan dengan criteria yang telah ditetapkan. Audit harus dilakukan oleh pihak yang kompeten dan independen.

Menurut Boynton (2006:6) terdapat beberapa ciri penting di dalam definisi tersebut dan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Proses sistematis, bahwa perencanaan audit serta perumusan strategi audit merupakan suatu bagian terpenting dari suatu proses audit. Perencanaan audit dan strategi audit harus saling berhubungan dengan pemilihan dan penilaian atas suatu bukti untuk suatu tujuan tertentu. Proses yang sistematis, logis dan berstruktur dalam rangkaian langkah untuk menjalani suatu prosedur berdasarkan pedoman profesional yang digunakan di dalam suatu proses audit yang berupa Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP) yang diterbitkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI).
2. Memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif. Kegiatan memperoleh dan mengevaluasi bukti merupakan hal yang penting dalam suatu audit. Jenis bukti yang di dapat serta criteria yang digunakan untuk mengevaluasi bukti bisa berbeda, antara audit yang satu dengan audit yang lainnya. Tetapi semua audit berpusat pada proses memperoleh dan mengevaluasi bukti. Dalam audit laporan keuangan, bukti tentang tingkat kesesuaian dengan asersi dalam laporan keuangan yang berprinsip sesuai dengan prinsip akuntansi. Menginterpretasikan bukti yang telah didapat dan dievaluasi agar auditor dapat memberikan pendapat wajar (*accounting judgements*) secara objektif dan tidak berprasangka kepada perorangan atau entitas yang telah membuat asersi tersebut.
3. Asersi tentang kegiatan dan peristiwa ekonomi. Asersi merupakan suatu pernyataan yang dibuat oleh manajemen perusahaan yang merupakan subjek pokok audit dan meliputi informasi yang dimuat dalam laporan keuangan, laporan operasi intern dan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT). Apabila seorang auditor melakukan audit terhadap laporan keuangan maka auditor harus mengetahui serta memahami asersi-asersi yang ada tetapi tidak diungkapkan secara tertulis.

4. Tingkat kesesuaian antara asersi dengan kriteria yang telah ditetapkan. Segala sesuatu yang dilakukan pada saat audit dikerjakan memiliki satu tujuan utama yaitu untuk merumuskan suatu pendapat terhadap asersi-asersi tentang kegiatan dan peristiwa ekonomi yang telah diaudit. Opini atau pendapat auditor dapat berupa kuantitatif misalnya kekurangan dana kas besar, atau dapat berupa kualitatif misalnya kewajaran atas laporan keuangan. Opini atau pendapat auditor ini dapat menunjukkan apakah asersi tersebut telah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
5. Kriteria yang telah ditetapkan sebagai dasar untuk menilai asersi atau pernyataan. Kriteria yang telah ditetapkan dapat berupa peraturan-peraturan spesifik yang dibuat oleh badan legislatif atau ukuran kinerja lainnya yang telah ditetapkan oleh manajemen.
6. Penyampaian hasil yang diperoleh dari laporan tertulis yang menunjukkan tingkat kesesuaian antara asersi dan kriteria yang telah ditetapkan. Penyampaian hasil ini dapat menghasilkan peningkatan atau penurunan tingkat kepercayaan pemakai informasi terhadap asersi yang telah dibuat oleh pihak audit.
7. Mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Hasil akhir dari audit adalah suatu laporan yang berisi informasi bagi pembaca mengenai tingkat kesesuaian antara asersi yang telah dibuat oleh klien dengan kriteria tertentu sesuai dengan yang disepakati sebagai dasar untuk mengevaluasi. Pihak-pihak yang berkepentingan adalah mereka yang menggunakan serta mengandalkan hasil temuan dari para auditor. Di dalam lingkungan bisnis, mereka adalah pemegang saham, kreditor dan masyarakat luas.

Berdasarkan penjelasan tersebut, audit dapat disimpulkan bahwa audit merupakan suatu proses sistematis yang dilakukan oleh pihak yang kompeten dan independen untuk mengumpulkan dan mengevaluasi bukti secara objektif, menentukan dan melaporkan tingkat kesesuaian antara asersi manajemen perusahaan dengan asersi atau kriteria yang telah ditetapkan. Proses audit ini

bertujuan untuk memberikan pendapat mengenai kewajaran atas laporan keuangan tersebut.

2.1.2 Jenis-Jenis Audit

Menurut Alvin A. Arens, Randal J. Elder, Mark S. Beasley yang dialih namakan menjadi Amir Abadi Jusuf (2013:16) jenis audit dibagi menjadi 3 yaitu:

1. Audit Operasional (*Operational Audit*)

Audit operasional mengevaluasi secara efisiensi dan efektivitas pada setiap bagian dari prosedur serta metode operasi pada organisasi. Pada bagian akhir dalam audit operasional, biasanya manajemen mengharapkan saran sebagai bahan untuk memperbaiki operasi.

Audit operasional adalah bagian audit yang *me-review* secara sistematis semua kegiatan organisasi dalam hubungannya dengan tujuan tertentu. Adapun tiga tujuan dalam audit operasional, yaitu : (1) mengevaluasi kinerja (2) mengidentifikasi kesempatan untuk peningkatan (3) membuat rekomendasi untuk perbaikan tindakan lebih lanjut.

Pihak yang memerlukan audit operasional adalah manajemen dan pihak ketiga. Hasil akhir dari audit operasional akan diserahkan pada pihak yang meminta dilaksanakannya audit tersebut.

2. Audit Kepatuhan (*Compliance Audit*)

Audit kepatuhan merupakan audit yang mempunyai tujuan untuk menentukan atau melihat apakah perusahaan yang diaudit sudah sesuai dengan peraturan, prosedur dan ketentuan-ketentuan lain yang telah ditetapkan oleh otoritas yang lebih tinggi. Hasil akhir dari audit kepatuhan biasanya akan dilaporkan atau diberikan kepada manajemen, karena manajemen merupakan bagian utama yang berkepentingan dalam tingkat ketaatan terhadap prosedur atau peraturan yang telah ditetapkan. Audit kepatuhan sering ditemui di dalam pemerintahan.

3. Audit Laporan Keuangan (*Financial Statement Audit*)

Audit atas laporan keuangan berhubungan dengan kegiatan mengevaluasi dan memperoleh bukti atas penyajian entitas terhadap posisi keuangan.

Mengevaluasi laporan keuangan dan arus kas bertujuan untuk dapat memberikan pendapat kewajaran kepada entitas tersebut, apakah laporan yang sudah disajikan telah dibuat secara wajar dan sesuai dengan peraturan yang ada pada Pedoman Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). Audit laporan keuangan ini dilakukan oleh auditor independen terhadap laporan yang diberikan oleh entitas tersebut. Hasil akhir dari audit laporan keuangan ini disajikan dalam bentuk tertulis yang berupa laporan audit. Laporan audit ini nantinya akan dibagikan kepada para pengguna informasi keuangan seperti kreditur, pemegang saham dan Kantor Pelayanan Pajak.

Sedangkan jenis-jenis audit apabila dilihat dari jenis pemeriksaannya, audit dibedakan menjadi 4 (Agoes, 2012:11) yaitu :

1. Manajemen Audit (*Operational Audit*)

Suatu pemeriksaan terhadap kegiatan operasi pada suatu perusahaan, termasuk di dalamnya kebijakan akuntansi dan kebijakan operasional yang telah diatur dan ditentukan oleh manajemen. Dengan tujuan untuk dapat mengetahui apakah kegiatan operasi tersebut telah ditentukan secara efektif, efisien dan ekonomis.

2. Pemeriksa Ketaatan (*Compliance Audit*)

Suatu pemeriksaan yang dilakukan untuk dapat mengetahui apakah perusahaan sudah menaati segala aturan-aturan serta kebijakan-kebijakan yang berlaku, baik yang ditentukan oleh pihak internal perusahaan seperti manajemen dan dewan komisaris, ataupun yang ditentukan oleh pihak eksternal seperti Pemerintah, Direktorat Jendral Pajak (DJP), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, dan lain-lain. Pemeriksaan ketaatan dapat dilakukan oleh auditor independen maupun auditor internal perusahaan.

3. Pemeriksaan Intern (*Internal Audit*)

Suatu pemeriksaan yang dilakukan oleh internal audit perusahaan, baik pemeriksaan terhadap laporan keuangan maupun pemeriksaan terhadap

catatan akuntansi perusahaan, serta memeriksa ketaatan terhadap aturan dan kebijakan manajemen yang telah ditentukan.

4. *Computer Auditing*

Suatu pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor independen terhadap suatu perusahaan dengan menggunakan *Electronic Data Processing (EDP) System* dalam proses memasukkan data akuntansinya. Terdapat dua metode yang dapat dilakukan oleh auditor, yaitu :

(1) *Audit Around The Computer*

Dalam audit ini auditor hanya memeriksa input dan output dari EDP Sistem tanpa melakukan tes terhadap proses di dalam EDP Sistem tersebut.

(2) *Audit Through The Computer*

Dalam audit ini auditor tidak hanya memeriksa input dan output nya saja, auditor juga melakukan tes terhadap EDP Sistem-nya. Dalam tes tersebut yang merupakan *compliance test* yang dilakukan dengan menggunakan *Generalized Audit Software* dan lain-lain, dengan memasukkan data palsu untuk mengetahui apakah data tersebut telah diproses sesuai dengan system yang seharusnya. Data palsu ini digunakan agar tidak mengganggu data yang asli.

2.1.3 Pengertian Auditor

Suatu kegiatan audit yang dilakukan oleh seorang auditor untuk menemukan ketidakwajaran atas laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan. Menurut *International Standard of Organization (2012:19011)* auditor adalah orang yang memiliki kompetensi untuk melaksanakan audit. Sedangkan menurut Standar Profesional Akuntan Publik (2001:34) tentang auditor yaitu bahwa auditor dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor. Berikut beberapa pengertian auditor menurut beberapa ahli.

Menurut Abdul Halim (2008:15) pengertian auditor yaitu:

Auditor adalah seseorang yang independen dan kompeten yang menyatakan pendapat atau pertimbangan mengenai kesesuaian dalam segala hal yang signifikan terhadap asersi atau entitas dengan kriteria yang ditetapkan.

Sedangkan menurut Mulyadi (2002:130) pengertian auditor yaitu:

Auditor adalah akuntan profesional yang menjual jasanya kepada masyarakat umum, terutama dalam bidang pemeriksaan terhadap laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan. Pemeriksaan tersebut terutama ditujukan untuk memenuhi segala kebutuhan kreditur, calon kreditur, investor, calon investor dan instansi pemerintah.

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa auditor adalah seseorang yang independen dan profesional di dalam bidang pemeriksaan atas laporan keuangan, serta memiliki peranan penting dalam aktivitas audit dan memiliki kemampuan dalam melaksanakan audit sesuai dengan standar yang berlaku.

2.1.4 Jenis-Jenis Auditor

Menurut Jusup (2001) auditor dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu:

1. Auditor Pemerintah

Auditor pemerintah merupakan auditor yang bertugas untuk melakukan audit atas keuangan Negara pada instansi-instansi pemerintah. Di Indonesia auditor pemerintah dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang terbentuk sebagai perwujudan dari Pasal 23 ayat 5 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi sebagai berikut :

“ Untuk memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan yang pengaturannya ditetapkan dengan undang-undang. Hasil pemeriksaan itu diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.”

Badan Pemeriksa Keuangan merupakan badan yang tidak tunduk kepada Pemerintah sehingga diharapkan agar dapat melakukan audit secara independen. Badan Pemeriksa Keuangan ini bukanlah badan yang berdiri

diatas Pemerintah. Hasil akhir dari audit yang dilakukan oleh BPK akan disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai alat kontrol atas pelaksanaan keuangan negara.

2. Audit Intern

Audit intern merupakan auditor yang bertugas pada perusahaan, audit ini berstatus sebagai karyawab pada perusahaan tersebut. Tugas audit intern yang paling utama adalah untuk membantu manajemen perusahaan tempat dimana ia bekerja. Pada perusahaan-perusahaan besar jumlah staf audit intern bisa mencapai ratusan orang. Pada umumnya audit intern harus memberikan laporan langsung kepada pimpinan perusahaan yang tertinggi yaitu direktur utama, atau biasanya ada pula yang membrikan laporan kepada pejabat tinggi tertentu pada perusahaan misalnya kontroler, atau adapula yang memberikan laporan kepada dewan komite audit yang dibentuk oleh dewan komisaris.

Tanggung jawab audit intern pada setiap perusahaan berbeda-beda, tergantung pada kebutuhan dari setiap perusahaan tersebut. Biasanya staf dari audit intern hanya terdiri dari dua sampai tiga orang saja yang sebagian besar waktunya digunakan untuk melakukan tugas rutin yaitu audit kesesuaian. Pada perusahaan yang lainnya, audit intern bisa mencapai ratusan orang dengan tugas yang bermacam-macam, termasuk juga melakukan tugas diluar bidang akuntansi. Belakangan ini banyak audit intern yang ikut terlibat dalam pengauditan operasional atau melakukan peningkatan keahlian di bidang evaluasi atas system komputer.

3. Auditor Independen

Audit independen atau yang biasa dikenal akuntan publik memiliki tanggung jawab utama yaitu melakukan fungsi pengauditan atas laporan keuangan yang diterbitkan oleh perusahaan. Pengauditan ini dilakukan pada perusahaan terbuka yaitu perusahaan yang menjual sahamnya kepada masyarakat luas melalui pasar modal, perusahaan besar lainnya serta organisasi yang tidak fokus bertujuan mencari laba. Oleh karena itu, semakin banyak perusahaan yang harus diaudit laporan keuangannya, serta

banyak pihak lain yang semakin mengenal laporan ini maka banyak orang awam yang mengenal audit independen sebagai akuntan publik, padahal ada beberapa jenis auditor yang memiliki pekerjaan dan fungsi yang berbeda-beda.

Praktik sebagai akuntan publik harus dilakukan melalui Kantor Akuntan Publik (KAP) yang sudah mendapatkan ijin dari Departemen Keuangan.

2.1.5 Tujuan Audit

Perusahaan perlu memiliki suatu pengendalian intern tersendiri sebagai penjamin atas tercapainya tujuan yang direncanakan oleh perusahaan. Agar dapat mencapai tujuan perusahaan tersebut, maka di dalam pelaksanaan kegiatan perlu pengawasan serta semua sumber ekonomi yang dimiliki harus dikerahkan dan digunakan dengan sebaik-baiknya. Berdasarkan beberapa definisi audit yang telah dibahas, dapat disimpulkan bahwa tujuan audit pada umumnya untuk menentukan kelayakan atas informasi keuangan, ketaatan terhadap peraturan serta kebijakan, rencana, prosedur dan pengamanan atas aktiva. Oleh karena itu, tujuan audit membuat para akuntan untuk memberikan pendapat mengenai kelayakan atas laporan keuangan yang sesuai dengan Standar Audit.

Menurut Tuanakotta (2014:84) tujuan audit yaitu:

Mengangkat tingkat kepercayaan dari pemakai laporan keuangan yang dituju, terhadap laporan keuangan itu. Tujuan itu dicapai dengan pemberian pendapat oleh auditor mengenai laporan keuangan apakah telah disusun dalam segala hal yang material sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku.

Sedangkan menurut Arens dkk (2016:168) tujuan audit yaitu:

Untuk menyediakan pemakai laporan keuangan suatu pendapat yang diberikan oleh auditor mengenai apakah laporan keuangan disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, sesuai dengan kerangka kerja akuntansi keuangan yang berlaku. Pendapat auditor ini menambah tingkat keyakinan pengguna yang bersangkutan terhadap laporan keuangan.

2.2 Pengendalian Intern

2.2.1 Pengertian Pengendalian Intern

Bagian yang sangat penting dalam suatu perusahaan salah satunya adalah pengendalian intern. Selain itu dunia usaha juga mempunyai perhatian yang semakin meningkat terhadap pengendalian intern, oleh karena itu hal tersebut sangat mempengaruhi kegiatan perusahaan maka perusahaan memerlukan pengendalian intern yang sangat baik dalam menjalankan tugasnya.

Berikut ini beberapa pengertian pengendalian intern menurut beberapa ahli:

Menurut Tuanakotta (2014:126) dapat didefinisikan sebagai berikut:

Pengendalian intern adalah proses yang dirancang, diimplementasi dan dipelihara oleh TCWG (*Those Charged With Governance*), manajemen dan karyawan lain untuk memberikan asuransi yang memadai tentang tercapainya tujuan entitas mengenai keandalan pelaporan keuangan, efektif dan efesiennya operasi dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan menurut Hery (2016:132) dapat didefinisikan sebagai berikut:

Pengendalian intern adalah kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memberikan kepastian yang layak bagi manajemen bahwa perusahaan telah mencapai tujuan dan sasaran.

Dari beberapa pengendalian intern di atas, dapat disimpulkan bahwa untuk mencapai tujuan organisasi maka manajemen perlu merancang kebijakan yang akan digunakan sebagai pedoman bagi perusahaan. Dalam pelaksanaan suatu kebijakan, prosedur merupakan langkah-langkah tertentu yang harus diamati. Sedangkan organisasi merupakan akhir dari suatu kegiatan yang dicapai oleh perusahaan, akhir atau hasil yang dimaksud adalah laba yang diperoleh oleh perusahaan.

2.2.2 Tujuan Pengendalian Intern

Perusahaan harus memiliki suatu pengendalian intern sebagai penjamin agar tercapainya tujuan dan sasaran yang telah direncanakan oleh perusahaan. Dengan adanya pengendalian intern ini, diharapkan agar dapat mengurangi

kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi dan dapat mencegah terjadinya penyelewengan dari pihak yang tidak bertanggung jawab. Dalam mencapai tujuan tersebut, maka pelaksanaan kegiatan yang sudah direncanakan harus diawasi dan sumber ekonomi yang ada harus digunakan dengan sebaik-baiknya.

Berdasarkan pengertian pengendalian intern yang telah dikemukakan diatas menurut Tuanakotta (2014:127) dapat disimpulkan bahwa pengendalian intern memiliki tujuan sebagai berikut: (1) Strategis, sasaran-sasaran utama yang mendukung entitas (2) Pelaporan keuangan (3) Operasi (4) Kepatuhan terhadap hukum dan ketentuan perundang-undangan.

Dari beberapa tujuan pengendalian intern tersebut, dapat dinyatakan bahwa pengendalian intern adalah suatu jawaban manajemen untuk mengatasi resiko yang diketahui, atau dengan sebutan lain untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan pengendalian intern pada dasarnya adalah untuk melindungi aktiva perusahaan, mendorong untuk lebih cermat dan lebih handal dalam pelaporan akuntansi, meningkatkan efisiensi dan efektivitas perusahaan, serta mendorong untuk lebih menaati aturan dan kebijakan manajemen yang telah ditentukan.

2.2.3 Komponen Pengendalian Intern

Pengendalian intern mempunyai komponen-komponen dasar serta kebijakan dasar yang telah dirancang dan digunakan oleh manajemen untuk dapat memberikan keyakinan yang memadai bahwa tujuan dari pengendalian dapat terpenuhi. Komponen-komponen ini disebut juga sebagai elemen-elemen struktur pengendalian intern.

Komponen pengendalian intern terbagi menjadi 5 (Tuanakotta, 2014:128-145) yaitu sebagai berikut:

1. *Control Environment* (Lingkungan Pengendalian)

Lingkungan pengendalian adalah dasar dari pengendalian intern yang efektif. Hal ini akan memberikan disiplin dan struktur bagi entitas. Hal ini juga akan menjadi petunjuk arah bagi entitas, sehingga akan membuat karyawan sadar akan pentingnya pengendalian dalam organisasi.

Lingkungan pengendalian memiliki unsur-unsur atas rancangan evaluasi auditor sebagai berikut:

- a. Komunikasi dan pelaksanaan nilai serta nilai lainnya. Nilai ini sangat penting dan merupakan komponen dasar yang memengaruhi efektifnya suatu rancangan, pelaksanaan serta pemantauan pengendalian lain.
- b. Komitmen terhadap kompetensi. Berkenaan dengan bagaimana pandangan dan pertimbangan manajemen mengenai tingkat kompetensi dari setiap tugas dan persyaratan pengetahuan, keterampilan dan pengalaman untuk tugas yang bersangkutan.
- c. Keikutsertaan TCWG adalah organisasi yang bertanggung jawab mengawasi arah strategis dari suatu perusahaan, dan kewajiban entitas yang berkenaan dengan akuntabilitas perusahaan.
- d. Gaya kepemimpinan pada umumnya. Pendekatan yang dilakukan oleh manajemen dalam mengambil dan mengolah resiko bisnis, sikap dan tindakan dalam pelaporan keuangan misalnya saat mengatur jumlah pemasukan dan laba.
- e. Struktur organisasi merupakan kerangka dimana tujuan entitas akan direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan dan *direview* kembali.
- f. Pembagian tugas dan tanggung jawab akan menunjukkan bagaimana tugas dan tanggung jawab itu ditetapkan, hubungan antara karyawan dan atasan, serta hierarki wewenang dalam entitas tersebut.
- g. Kebijakan dan prosedur sumber daya manusia yang berkenaan dengan fungsi HRD, yaitu pekerjaan, orientasi, pelatihan, evaluasi, bimbingan, promosi, pemberian kompensasi atas pelanggaran, serta tindakan perbaikan.

2. Risk Assessment (Penilaian Resiko)

Penilaian resiko atau *Risk Assesment* dapat dilihat pada entitas dan auditor. Entitas akan melakukan penilaian atas resiko melalui sudut pandang ancaman terhadap pencapaian dari tujuan entitas, salah satunya adalah menghasilkan laporan keuangan yang bersih dari kecurangan yang material. Oleh karena itu, entitas harus merancang, mengimplementasikan

dan menjaga atau memelihara pengendalian intern. Di sisi lain auditor akan menilai resiko sebagai bagian dari proses audit. Dalam pembahasan komponen kali ini, dapat dilihat adanya persinggungan antara kepentingan entitas dan auditor. Proses dalam melakukan penilaian resiko pada entitas tersebut pada umumnya menyangkut hal-hal berikut: (1) Perubahan dalam lingkungan operasi entitas. (2) Pejabat atau karyawan senior yang baru bergabung dengan entitas tersebut. (3) Sistem informasi yang baru atau yang mengalami perubahan-perubahan besar. (4) Teknologi baru. (5) Model bisnis, produk atau kegiatan baru. (6) Restrukturisasi korporasi. (7) Perluasan kegiatan di luar negeri. (8) Munculnya pernyataan akuntansi yang baru.

3. *Information System and Communication* (Sistem Informasi dan Komunikasi)

Manajemen membutuhkan informasi yang handal untuk mengelola perusahaan, mencapai tujuan dan mengidentifikasi, menilai dan menanggapi faktor resiko. Semua ini memerlukan informasi yang tepat, meliputi infrastruktur, perangkat lunak, manusia, prosedur dan data. Untuk memahami sistem informasi, auditor melakukan upaya serta perlu memperhatikan hal-hal berikut ini: (1) sumber informasi yang digunakan (2) bagaimana informasi direkam dan diolah (3) bagaimana informasi yang dihasilkan yang kemudian akan digunakan. Sedangkan komunikasi merupakan unsur kunci di dalam suksesnya sistem informasi.

4. *Control Activities* (Aktivitas Pengendalian)

Aktivitas pengendalian merupakan kebijakan dan prosedur yang memastikan bahwa arahan dan petunjuk yang diberikan oleh manajemen telah dilaksanakan. Aktivitas pengendalian mempunyai beberapa tujuan dan dilaksanakan diberbagai tingkat organisasi dan fungsi. Pada umumnya, aktivitas pengendalian yang mungkin relevan dengan audit dapat digolongkan sebagai bentuk kebijakan dan prosedur yang berkaitan dengan hal-hal berikut: (1) Pembagian tugas (2) Otorisasi (3) Aplikasi IT (4) Pengendalian fisik.

5. *Monitoring* (Pemantauan)

Pemantauan merupakan komponen terakhir di dalam pengendalian intern. Komponen ini akan menilai efektif atau tidaknya kinerja pengendalian intern setelah berjalannya waktu. Pemantauan ini bertujuan untuk mengetahui apakah pengendalian telah berjalan sebagaimana mestinya, jika tidak sesuai maka akan diambil tindakan sebagai perbaikan. Pemantauan ini nantinya akan memberikan dampak sebagai umpan balik kepada manajemen mengenai apakah sistem pengendalian intern yang dirancang telah dapat mengatasi resiko-resiko sebagai berikut:

- a. Efektif dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
- b. Dipahami dan dilaksanakan dengan baik oleh karyawan.
- c. Ditaati dan digunakan setiap harinya.
- d. Diperbarui sesuai dengan perubahan kondisi.

2.3 Standar Profesional Akuntan Publik

Hingga saat ini IAPI sudah menerbitkan standar-standar yang digunakan sebagai acuan KAP dalam melakukan pekerjaannya. Standar inilah yang disebut sebagai Standar Profesi Akuntan (SPAP). Berikut ini ada 5 standar yang terdapat dalam SPAP (IAPI,2016) yang sampai saat ini masih digunakan sebagai acuan, yaitu:

1. Kode Etik Profesi Akuntan Publik

Kode Etik Profesi Akuntan Publik terdiri atas dua bagian yaitu, bagian A dan Bagian B. Bagian A membahas tentang prinsip dasar etika profesi dan memberikan kerangka yang terkonsep sebagai penerapan kerangka tersebut. Sedangkan bagian B memberikan gambaran mengenai penerapan kerangka yang terkonsep tersebut pada situasi tertentu (Kode Etik Profesi Akuntan Publik, 2013:2).

Kode Etik Profesi Akuntan Publik ini menetapkan prinsip yang mendasar dan etika profesi akuntan yang harus diterapkan oleh setiap individu yang ada dalam Kantor Akuntan Publik (KAP), baik yang merupakan anggota organisasi IAPI maupun yang tidak tergabung dalam organisasi tersebut.

Anggota IAPI yang tidak tergabung dalam anggota KAP dan tidak memberikan jasa profesional tetap harus mematuhi dan menerapkan semua yang ada pada bagian A dan bagian B dari Kode Etik Profesi Akuntan Publik (Kode Etik Profesi Akuntan Publik, 2013:2).

2. Standar Atestasi

Standar attestasi ini memberikan gambaran sebagai fungsi astesi bagi jasa akuntan publik yang mencakup tingkat keyakinan tertinggi yang akan diberikan dalam jasa audit atas laporan keuangan, pemeriksaan atas laporan keuangan dan tipe perikatan attestasi lain yang memberikan keyakinan lebih rendah. Standar ini terdiri dari 11 standar dan dirangkum dalam bentuk Pernyataan Standar Atestasi (PSAT). PSAT adalah penjelasan lebih lanjut dari masing-masing standar yang ada di dalam standar attestasi ini. Interpretasi Pernyataan Standar Atestasi (IPSAT) merupakan bagian yang terdapat di dalam PSAT. IPSAT adalah interpretasi resmi terhadap ketentuan-ketentuan yang telah diterbitkan oleh Dewan dalam PSAT. Oleh karena itu, IPSAT telah menjadi jawaban atas pertanyaan serta keraguan di dalam menafsirkan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam PSAT sehingga ini akan menjadi perluasan lebih lanjut bagi ketentuan yang ada dalam PSAT. Penafsiran resmi ini bersifat mengikat bagi anggota Ikatan Akuntansi Indonesia yang bekerja sebagai akuntan publik yang bersifat wajib.

3. Standar Audit

Standar auditing adalah pedoman audit atas laporan keuangan historis. Standar auditing terdiri atas kode etik profesi akuntan, SA 200, 300, 400, 500, 600, 700 dan 800. Bagian-bagian yang terdapat dalam SA ini akan dirinci pada masing-masing bagian SA. Pada tahun 2013, Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) telah mengadopsi *International Standard Auditing* (ISA) yang diterbitkan oleh *International Federation of Accountant* (IFAC) sebagai pedoman untuk melakukan kegiatan auditing.

4. Standar Pengendalian Mutu (SPM)

Pada SPM 1 (2013:1) disebutkan bahwa Standar Pengendalian Mutu (SPM) mengatur tanggung jawab atas Kantor Akuntan Publik (KAP) terhadap sistem pengendalian mutu dalam melaksanakan perikatan selain asurans. SPM memiliki tujuan untuk memberikan konteks ketentuan yang ditetapkan dan ditujukan untuk dapat membantu KAP di dalam memahami hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut.

Pada SPM 1 (2013:3) disebutkan bahwa tujuan KAP dalam menetapkan dan menjaga sistem pengendalian mutu adalah untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa KAP dan anggotanya telah mematuhi standar profesi, ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku serta laporan yang dikeluarkan oleh KAP atau anggota perikatan telah sesuai dengan keadaanya.

Pada kerangka ini tidak menetapkan standar atau menyediakan prosedur untuk melakukan kegiatan asurans, prinsip dasar dan panduan yang terkait untuk melakukan untuk melakukan perikatan asurans yang konsisten dengan kerangka ini yang ditungkan dalam SA, SPR dan SPA. Hubungannya telah digambarkan dalam Standar Profesional Akuntan Publik yang diterapkan oleh DSPAP (Kerangka Untuk Perikatan Asurans, 2013:1).

5. Standar Perikatan *Review*

Standar Perikatan *Review* (SPR) memiliki tujuan untuk menetapkan standar dan menyediakan panduan tentang tanggung jawab professional kepada seorang praktisi, yang bukan merupakan auditor dari suatu entitas, melaksanakan suatu perikatan untuk meriview laporan keuangan mengenai bentuk dan isi laporan yang dikeluarkan oleh praktisi dalam kaitannya dengan review tersebut. Jika seorang praktikisi yang merupakan auditor pada suatu entitas tertentu, membuat perikatan untuk me-*review* informasi keuangan berdasarkan SPR 2410 tentang “*Review* atas Informasi Keuangan Interim yang dilaksanakan oleh Auditor Independen suatu Entitas” (SPAP SPR 2400, 2013:1)

Menurut SPR 2400, perikatan *review* atas laporan keuangan memiliki tujuan untuk memungkinkan seorang praktisi untuk menyatakan apakah prosedur yang tidak menyediakan semua bukti sebagaimana yang disyaratkan dalam suatu audit, terdapat hal-hal yang menjadi perhatian khusus bagi auditor yang menyebabkan auditor yakin bahwa laporan keuangan tidak disajikan dalam semua bentuk hal yang material, sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku (SPAP SPR 2400, 2013:1).

2.4 Audit Laporan Keuangan

Audit laporan keuangan berhubungan dengan kegiatan memperoleh dan mengevaluasi bukti-bukti mengenai penyajian entitas terhadap posisi keuangan, arus kas dan hasil operasi dengan maksud agar dapat memberikan pendapat tentang laporan-laporan tersebut, apakah laporan tersebut telah disajikan secara wajar dan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu Pedoman Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) (Boynton dan Johnson, 2006:8).

Sedangkan audit laporan keuangan menurut Arens (2015:8) yaitu suatu bentuk pemberian jasa attestasi dimana auditor mengeluarkan laporan dalam bentuk tertulis yang menyatakan pendapat mengenai kewajaran atas suatu laporan keuangan dan kesesuaiannya dengan standar akuntansi yang berlaku. Audit merupakan jasa yang pa;ing umum dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP).

Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa audit laporan keuangan adalah jasa yang paling sering dilakukan oleh suatu KAP. Pada jasa ini auditor melakukan kegiatan evaluasi atas bukti yang diperoleh tentang penyajian entitas atas laporan keuangan serta menilai kewajaran suatu laporan keuangan tersebut sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.

2.4.1 Tujuan Audit Laporan Keuangan

Audit laporan keuangan memiliki tujuan yang dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Tujuan Umum

Tujuan audit secara umum menurut Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dalam Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) SA 200 (2013:1) menyebutkan bahwa tujuan suatu audit adalah untuk meningkatkan keyakinan atas keandalan laporan keuangan kepada pihak pengguna laporan keuangan yang dituju. Tujuan audit secara umum ini diraih melalui pernyataan suatu opini oleh auditor tentang bagaimana laporan keuangan disusun dalam semua hal yang material, apakah telah sesuai dengan suatu kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Pada umumnya opini tersebut adalah tentang apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material dan sesuai dengan kerangka yang berlaku. Untuk meraih tujuan tersebut, hal yang dilakukan dalam audit adalah mengidentifikasi sejumlah tujuan khusus audit bagi setiap akun yang dilaporkan di dalam laporan keuangan.

2. Tujuan Khusus

Tujuan audit secara khusus ini diambil dari asersi yang dibuat oleh manajemen yang dimuat dalam laporan keuangan. Asersi adalah pernyataan manajemen yang terdapat di dalam komponen laporan keuangan. Asersi yang digunakan oleh auditor dalam mempertimbangkan jenis kesalahan dapat digolongkan sebagai berikut (SPAP SA 315, 2013:49):

a. Golongan Transaksi dan Peristiwa

1. Keterjadian, transaksi dan peristiwa yang telah dicatat dan telah terjadi yang berkaitan dengan entitas.
2. Kelengkapan, semua transaksi dan peristiwa yang dibukukan seharusnya sudah tercatat.
3. Keakurasian, jumlah dan data yang berkaitan dengan transaksi dan peristiwa yang telah dibukukan dan dicatat dengan benar.
4. Pisah batas, transaksi dan peristiwa yang telah dibukukan dalam periode akuntansi yang tepat.

5. Klasifikasi, transaksi dan peristiwa yang dibukukan dalam akun yang tepat.

b. Saldo Akun pada Akhir Periode

1. Eksistensi, yaitu aset, liabilitas dan ekuitas pada akhir periode.
2. Hak dan kewajiban, yaitu apakah entitas memiliki hak atas aset dan memiliki kewajiban atas liabilitas.
3. Kelengkapan, yaitu seluruh aset, liabilitas dan ekuitas yang dibukukan telah terecatat dengan tepat.
4. Penilaian dan pengalokasian, yaitu aset, liabilitas dan ekuitas yang terdapat dalam laporan keuangan tercatat dengan tepat dan penyesuaian penilaian yang terjadi dibukukan secara tepat.

c. Penyajian dan Pengungkapan

1. Keterjadian hak dan kewajiban, yaitu peristiwa, transaksi dan hal lain yang diungkapkan telah terjadi dan berkaitan dengan entitas.
2. Kelengkapan, yaitu semua yang harus terdapat dalam laporan keuangan telah disajikan.
3. Klasifikasi dan keterpahaman, yaitu mengenai informasi keuangan telah dibukukan dan disajikan dengan akun yang tepat dan dijelaskan dengan tepat serta diungkapkan secara tepat.
4. Keakurasian dan penilaian, yaitu mengenai informasi keuangan dan informasi lain diungkapkan secara wajar dan pada jumlah yang tepat.

2.4.2 Tahap-Tahap Audit atas Laporan Keuangan

Prosedur pelaksanaan audit laporan keuangan menurut Mulyadi (2002:121-123) berbasis resiko dapat dibagi menjadi empat tahap, yaitu:

1. Penerimaan Perikatan Audit

Dalam penerimaan perikatan audit, klien memberikan tugas audit atas laporan keuangan kepada auditor, dan auditor akan menerima melakukan pekerjaan audit tersebut berdasarkan kompetensi profesionalnya. Langkah pertama yang dilakukan untuk melakukan pekerjaan audit atas laporan

keuangan yaitu berupa pengambilan keputusan untuk menerima atau menolak perikatan audit dari calon klien, atau untuk memilih melanjutkan atau menghentikan perikatan pada klien berulang. Pada tahap penerimaan perikatan audit ini, auditor akan melakukan suatu proses yang meliputi evaluasi integritas manajemen, identifikasi keadaan khusus serta resiko luar biasa, menentukan kompetensi untuk melakukan tugas audit, menilai secara independensi, dan menentukan kemampuan untuk menggunakan ke-profesionalannya dengan kecermatan dan ketelitiannya, setelah itu berulah membuat surat perikatan audit.

2. Perencanaan Audit

Kualitas perencanaan audit yang dibuat oleh auditor sangat menentukan keberhasilan penyelesaian perikatan audit. Pada perencanaan audit, auditor diharapkan untuk dapat memahami bisnis dan industri klien, serta memahami sistem pengendalian intern klien.

3. Pelaksanaan Pengujian Audit

Pada tahap pelaksanaan pengujian audit ini sering disebut dengan pekerjaan lapangan. Pelaksanaan pengujian audit ini memiliki tujuan utama yaitu untuk memperoleh bukti audit tentang efektivitas pengendalian intern klien dan kewajaran atas laporan keuangan pada klien. Pada tahap ini, langkah pertama yang dilakukan oleh auditor yaitu membuat program audit yang digunakan untuk pengujian pengendalian intern klien serta menilai kewajaran atas laporan keuangan klien. Setelah pelaksanaan pengujian audit selesai dilaksanakan, selanjutnya auditor akan melakukan evaluasi dan menilai hasil dari pelaksanaan program pengujian audit tersebut yang akan dituliskan dalam kertas kerja.

4. Pelaporan Audit

Tahap akhir audit atas laporan keuangan yaitu berupa pelaporan audit. Pada tahap ini terdapat dua tahapan penting, yaitu: (1) Menyelesaikan audit dengan merangkum semua hasil pengujian serta menarik kesimpulan (2) Mengeluarkan hasil laporan audit. Hasil dari tahap pelaksanaan pengujian audit yang berupa kertas kerja tersebut, auditor akan menarik

kesimpulan secara menyeluruh serta memberikan pendapat atau opini mengenai kewajaran atas laporan keuangan yang diberikan oleh klien. Pada proses ini sifatnya sangat subjektif, dimana sangat tergantung pada pertimbangan profesional auditor.

2.5 Perencanaan Audit Laporan Keuangan

Dalam melaksanakan proses audit, audit terbagi menjadi empat tahapan penting. Salah satu dari tahapan penting tersebut yaitu perencanaan. Perencanaan mencakup pengembangan strategi secara menyeluruh mengenai pelaksanaan dan ruang lingkup audit yang diharapkan. Auditor harus merencanakan audit dengan sikap profesionalisme tentang berbagai hal misalnya integritas manajemen, kekeliruan dan ketidakselesaian, serta tindakan melawan hukum (Jusup, 2001). Oleh sebab itu, dalam perencanaan audit laporan keuangan diperlukan penyusunan suatu kerangka kerja yang menyeluruh tentang pelaksanaan yang akan dikerjakan, waktu, tempat, tujuan dan sifat dari audit yang dilakukan.

Perencanaan audit merupakan suatu tahapan yang sangat terperinci, di dalamnya menyangkut tentang prosedur dan rencana auditor yang akan digunakan dalam pelaksanaan audit. Dalam mengaudit suatu laporan keuangan, auditor harus sangat benar-benar merencanakan proses audit agar audit berjalan secara efektif dan efisien. Pada Standar Audit (SA) alinea kedua menyebutkan bahwa perencanaan suatu audit melibatkan penetapan strategi audit secara keseluruhan untuk perikatan tersebut dan pengembangan rencana audit (2013:1).

Menurut SA seksi 311 paragraf 3, di dalam melakukan perencanaan audit, auditor harus mempertimbangkan beberapa hal, yaitu:

1. Masalah yang berkaitan dengan bisnis entitas tersebut serta industri yang menjadi tempat usaha entitas tersebut.
2. Kebijakan serta prosedur akuntansi yang ada pada entitas tersebut.
3. Metode yang digunakan oleh entitas tersebut dalam mengolah informasi akuntansi secara signifikan, termasuk juga dalam penggunaan organisasi jasa dari luar untuk mengelola informasi akuntansi pokok entitas.
4. Tingkat resiko pengendalian yang telah direncanakan.

5. Pertimbangan awal mengenai tingkat materialitas sebagai tujuan audit.
6. Pos laporan keuangan yang mungkin membutuhkan penyesuaian (*adjustment*).
7. Keadaan yang mungkin membutuhkan perluasan atau perubahan pengujian audit, misalnya resiko kekeliruan atau kecurangan (*fraud*) yang material atau adanya transaksi antar pihak yang memiliki tujuan special.

2.6 Tahap-Tahap Perencanaan Audit Laporan Keuangan

Setelah auditor memilih untuk menerima perikatan audit dari klien, hal selanjutnya yang perlu dilakukan adalah menentukan perencanaan audit.

Untuk dapat membantu mempelajari perencanaan audit laporan keuangan, maka penulis mengambil beberapa tahap-tahap perencanaan audit laporan keuangan menurut beberapa sumber. Dari beberapa sumber tersebut terdapat perbandingan yang diharapkan dapat saling melengkapi, karena ada beberapa tahap-tahap perencanaan audit keuangan yang tidak dijelaskan secara terperinci antara yang satu dengan yang lainnya. Berikut ini beberapa tahap-tahap dari berbagai sumber:

1. Tahap-Tahap Perencanaan Audit Laporan Keuangan (Mulyadi, 2002)

- a. Memahami bisnis dan industri pada klien.
- b. Melakukan prosedur analitik.
- c. Mempertimbangkan tingkat materialitas awal.
- d. Memperibandingkan resiko bawaan.
- e. Memahami pengendalian intern pada klien.
- f. Mempertimbangkan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap saldo awal, jika perikatan dilakukan di tahun pertama.

2. Tahap-Tahap Perencanaan Audit Laporan Keuangan (Boynton *et al*, 2006)

- a. Melakukan pemahaman tentang bisnis dan industri pada klien.
- b. Melakukan prosedur analitis.
- c. Membuat pertimbangan awal mengenai tingkat materialitas.

- d. Mempertimbangkan resiko audit.
- e. Mengembangkan strategi awal untuk asersi signifikan.
- f. Melakukan pemahaman tentang pengendalian intern pada klien.

3. Tahap-Tahap Perencanaan Audit Laporan Keuangan (Arens, 2015)

- a. Menerima klien dan melakukan perencanaan audit awal.
- b. Memahami bisnis dan industri pada klien.
- c. Menilai resiko bisnis pada klien.
- d. Melakukan prosedur analitis pendahuluan.
- e. Menetapkan materialitas dan menilai resiko audit yang dapat diterima beserta resiko bawaan.
- f. Memahami pengendalian intern dan menilai resiko pengendalian.
- g. Mengumpulkan informasi untuk menilai resiko kecurangan.
- h. Mengembangkan strategi audit dan program audit secara keseluruhan.

4. Tahap-Tahap Perencanaan Audit Laporan Keuangan Menurut Standar Auditing (IAI, 2001)

- a. Memperoleh informasi tentang masalah yang berkaitan dengan bisnis dan industri entitas yang menjadi tempat usaha entitas tersebut (SA seksi 318).
- b. Memperoleh informasi tentang kebijakan dan prosedur akuntansi pada entitas tersebut (SA seksi 318).
- c. Metode yang digunakan pada entitas tersebut dalam mengolah informasi akuntansi yang signifikan, termasuk juga penggunaan organisasi jasa dari luar untuk mengolah informasi akuntansi pokok perusahaan (SA seksi 311 dan SA seksi 324).
- d. Melaksanakan prosedur analitik (SA seksi 329).
- e. Pertimbangan awal tentang tingkat materialitas untuk tujuan audit (SA seksi 312).
- f. Kondisi yang mungkin memerlukan perluasan atau mengubah pengujian audit misalnya, resiko kekeliruan atau kecurangan yang

material atau adanya transaksi antar pihak yang mempunyai hubungan istimewa (SA seksi 316 dan SA seksi 319).

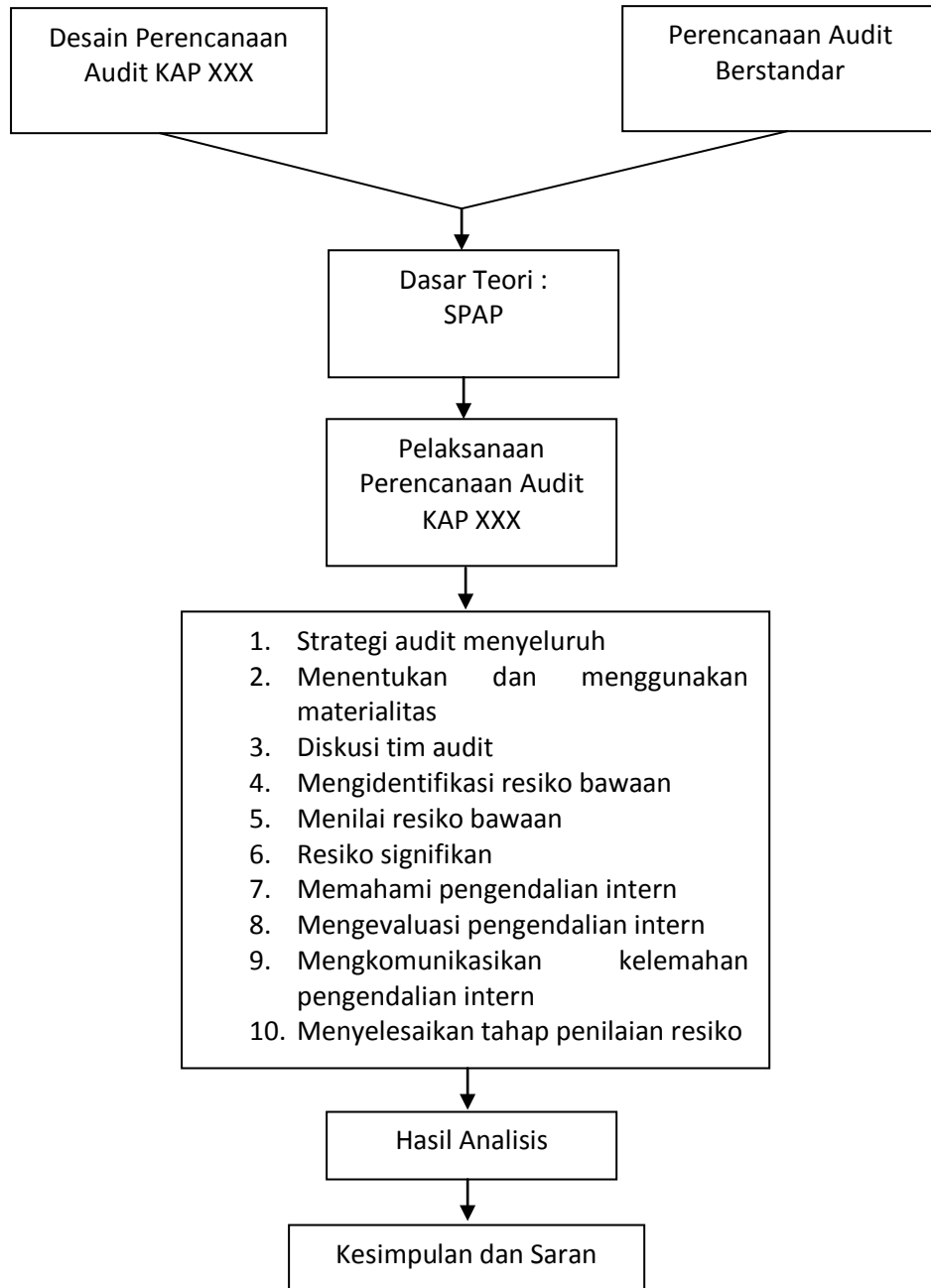
- g. Memperoleh pemahaman mengenai struktur pengendalian intern pada klien (SA seksi 319).
- h. Menetapkan tingkat resiko pengendalian yang direncanakan (SA seksi 312 dan SA seksi 319)
- i. Membuat kertas kerja (SA seksi 339)
- j. Pos laporan keuangan yang mungkin memerlukan penyesuaian atau *adjustment* (SA seksi 311).
- k. Sifat laporan auditor yang diharapkan akan diserahkan misalnya, laporan auditor tentang laporan keuangan konsolidasian, laporan keuangan yang akan diserahkan ke Bapepam, laporan khusus untuk menggambarkan kepatuhan klien terhadap kontrak perjanjian (SA seksi 311).

Setelah membandingkan tahap-tahap perencanaan audit berdasarkan beberapa sumber diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya tahap-tahap perencanaan audit laporan keuangan yang dirumuskan mereka adalah sama. Pada penelitian ini, penulis akan menggunakan tahap-tahap perencanaan audit laporan keuangan berdasarkan Standar Auditing yang ditetapkan oleh IAI dalam SPAP sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia.

2.7 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan masalah yang telah diuraikan diatas, maka secara skematis dapat dibuat kerangka pemikiran berikut:

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



2.8 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan penjabaran teori dan kerangka pemikiran, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

1. Pengaruh Kompetensi Auditor Terhadap Perencanaan Audit
Hipotesis : Kompetensi auditor berpengaruh positif terhadap perencanaan audit.
2. Pengaruh Tekanan Waktu Terhadap Perencanaan Audit
Hipotesis : Pengaruh tekanan waktu berpengaruh positif terhadap perencanaan audit.
3. Pengaruh Independensi Auditor Terhadap Perencanaan Audit
Hipotesis : Pengaruh independensi auditor berpengaruh positif terhadap perencanaan audit.
4. Pengaruh Kompetensi, Tekanan Waktu dan Independensi Auditor Terhadap Perencanaan Audit
Hipotesis : Pengaruh kompetensi, tekanan waktu dan independensi auditor berpengaruh positif terhadap perencanaan audit.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat kualitatif. Penelitian ini adalah penelitian yang akan menganalisis kesesuaian perencanaan audit atas laporan keuangan dengan proses audit yang dilaksanakan pada KAP XXX. Penelitian ini menjelaskan tentang desain perencanaan audit hasil dari observasi peneliti di KAP XXX. Peneliti mengharapkan agar hasil penelitian ini dapat berguna sebagai pengembangan dan peningkatan kualitas pada KAP XXX.

Pada penelitian ini, data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah sumber data penelitian yang didapat secara langsung dari sumber asli dan tidak melalui perantara. Data primer dikumpulkan secara khusus oleh peneliti untuk menjawab pernyataan penelitian. Menurut Supomo dan Indriantomo (2002:146), data primer dapat berupa opini subjek atau orang secara individual maupun kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda secara fisik, kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian. Data primer yang digunakan pada penelitian ini adalah wawancara.

Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui perantara. Data sekunder yang digunakan pada penelitian ini merupakan data yang tersedia di KAP XXX yang dapat digunakan secara langsung maupun tidak langsung dalam melakukan analisis data. Data sekunder yang dimaksud adalah berupa bukti atau dokumentasi perencanaan audit laporan keuangan di KAP XXX.

3.2 Metode Pengumpulan Data

- a. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data dengan metode survei yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subjek peneliti. Pada umumnya wawancara dilakukan melalui tanya jawab dengan

pihak yang bertanggungjawab terhadap perencanaan audit atas laporan keuangan pada KAP XXX.

- b. Observasi, yaitu proses pencatatan pola perilaku subjek atau orang, objek atau benda, atau kejadian yang sistematis tanpa adanya pertanyaan atau komunikasi dengan individu-individu yang diteliti. Observasi dilakukan selama kurang lebih 40 hari selama peneliti menjadi staf magang sebagai junior auditor di KAP XXX.
- c. Dokumentasi, yaitu data yang diperoleh dengan cara menelaah dokumen dan catatan yang berhubungan dengan proses perencanaan audit atas laporan keuangan di KAP XXX.

3.3 Analisis Data

Analisis data ini dilakukan dengan beberapa langkah berikut:

- a. Memperoleh pemahaman mengenai desain perencanaan audit di KAP XXX.
- b. Menguji kesesuaian pelaksanaan perencanaan audit atas laporan keuangan KAP XXX menurut SPAP yang berlaku dan membandingkan antara desain yang telah di dapat sebelumnya.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

4.1.1 Profil Singkat KAP XXX

Kantor Akuntan Publik (KAP) XXX merupakan penggabungan dua orang Akuntan Publik yang telah berpengalaman dibidang profesi Akuntan Publik lebih dari 15 tahun. Izin usaha KAP XXX dari Kementrian Keuangan Republik Indonesia dikeluarkan sejak tanggal 26 Maret 2010. Jasa-jasa yang diberikan meliputi Jasa Pemeriksaan Umum (General Audit) atas Laporan Keuangan Perusahaan, Jasa Pemeriksaan Khusus (Spesial Audit), Jasa Konsultasi Perpajakan, Jasa Akuntansi (*Accounting Service*), dan Jasa Audit Dana Kampanye Pemilu/Pilkada (AUP). Dengan dukungan tenaga-tenaga ahli yang professional dan berkompentensi dibidangnya diharapkan KAP XXX akan menjadi Kantor Akuntan Publik yang dapat berperan dalam pembangunan perekonomian di Indonesia pada umumnya.

4.1.2 Visi dan Misi KAP XXX

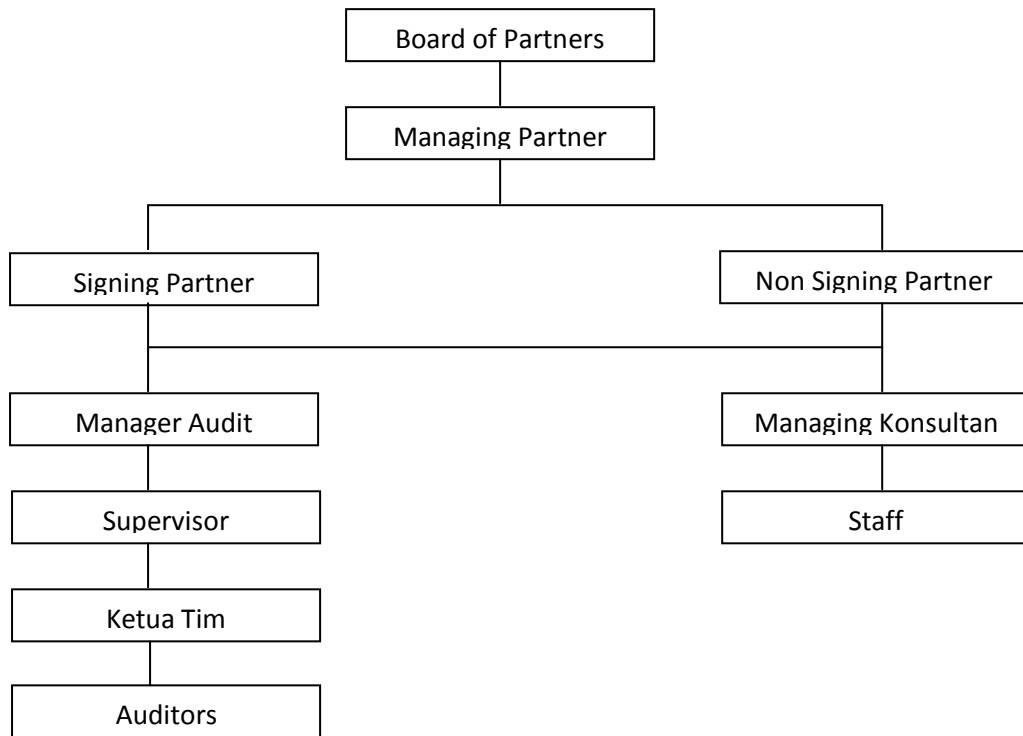
Visi:

Menjadi perusahaan jasa professional yang dapat dipercaya oleh pengguna jasa Kantor Akuntan Publik

Misi:

Mengutamakan kepuasan pelanggan dengan meningkatkan kompetensi sumber daya, yang berinovasi profesi secara berkesinambungan.

4.1.3 Struktur Organisasi KAP XXX



Sumber: KAP XXX

4.2 Pembahasan Penelitian

Pembahasan pada bab ini akan melaporkan hasil penelitian pada KAP XXX. Selain itu, pembahasan penelitian ini akan mengacu pada landasan teori yang telah dijelaskan dalam tinjauan pustaka pada Bab 2.

4.2.1 Desain Perencanaan Audit atas Laporan Keuangan pada KAP XXX

Sebelum membahas kesesuaian perencanaan audit atas laporan keuangan pada KAP XXX, peneliti akan terlebih dahulu menjelaskan desain perencanaan audit yang diterapkan oleh KAP XXX setiap dalam penugasan dan pendokumentasian perencanaan audit atas laporan keuangan pada suatu perikatan.

Metode pengumpulan data atas perencanaan audit pada KAP XXX adalah dengan cara studi dokumentasi atas perencanaan audit yang dilakukan selama peneliti melakukan observasi. Perencanaan audit atas laporan keuangan pada KAP XXX pada saat ini mengikuti *tools* yang diberikan oleh Kementerian Keuangan. Tetapi sebelum ini perencanaan audit atas laporan keuangan pada KAP XXX mempunyai perangkat modulnya tersendiri yang dilakukan secara terpisah. Dokumentasi yang terkait dalam perencanaan audit atas laporan keuangan pada KAP XXX antara lain E-1 *Audit Strategy Memorandum*, E-2 *Audit Planning Memorandum*, E-3 *Assessment of Fraud Risk*, E-4 *Audit Risk Assessment and Commentary*, E-5 *Planning and Performance Materiality*. Beberapa rangkaian desain tersebut akan diuraikan sebagai berikut:

1. E-1 Audit Strategy Memorandum

Audit strategy memorandum berisi tentang gambaran umum hal-hal yang akan didokumentasikan dalam proses perencanaan audit. Setelah itu bagian yang tertera dibawah ini akan dijelaskan secara rinci dalam indeks E-2 *Audit Planning Memorandum*, E-3 *Assessment of Fraud Risk*, E-4 *Audit Risk Assessment and Commentary*, E-5 *Planning and Performance Materiality*.

a. *The Entity's Business*

Pada bagian *The Entity's Business* KAP XXX akan mendokumentasikan penjelasan tentang entitas bisnis klien misalnya dengan mempertimbangkan tentang kegiatan dan usaha entitas; sejarah pendirian; tujuan dan strategi bisnis; dan proses manajemen.

b. *Reporting Objectives, Timing of the Audit and Communications Required*

Pada bagian ini, berdasarkan dokumen perencanaan audit atas laporan keuangan pada KAP XXX auditor dapat mempertimbangkan hal-hal berikut ini ketika akan memastikan tujuan pelaporan atas suatu perikatan, waktu audit, dan sifat komunikasi yang diperlukan:

1. *Time Table*
2. Pertemuan dengan manajemen atas tata kelola untuk membahas sifat, lingkup dan waktu kerja audit.
3. Diskusi dengan manajemen atas tata kelola mengenai jenis dan waktu yang diharapkan atas laporan keuangan yang akan dikeluarkan serta komunikasi lainnya, baik yang bersifat tertulis maupun yang bersifat lisan, termasuk juga laporan audit.
4. Melakukan komunikasi dengan auditor komponen (jika ada) mengenai tentang jenis yang diharapkan dan waktu laporan yang dikeluarkan serta komunikasi lain yang berhubungan dengan audit komponen.
5. Sifat dan waktu komunikasi yang ada diantara anggota tim perikatan, termasuk sifat dan waktu pertemuan tim dan waktu atas tinjauan pekerjaan yang sedang dilakukan.
6. Apakah terdapat komunikasi lain yang diharapkan dengan pihak ketiga, termasuk tanggung jawab atas pelaporan hukum yang timbul dari audit.

c. *Direction of the Audit*

Pada dokumen perencanaan audit atas laporan keuangan pada KAP, auditor dapat mempertimbangkan hal-hal berikut ini saat mengatur arah audit:

1. Berhubungan dengan materialitas antara lain; pengaturan materialitas untuk tujuan perencanaan; pengaturan dan

mengkomunikasikan materialitas dengan auditor komponen; melakukan pertimbangan kembali materialitas sebagai prosedur audit yang dilakukan selama melakukan audit; mengidentifikasi komponen material dan saldo akun.

2. Melakukan komunikasi dengan perusahaan lain yang terlibat dalam pelaksanaan audit.
3. Audit area yang terdapat resiko salah saji material yang lebih tinggi.
4. Dampak atas resiko salah saji material yang dinilai pada tingkat laporan keuangan menyeluruh terhadap arah, pengawasan dan peninjauan.
5. Pemilihan tim dalam keterlibatan dan penugasan kerja audit kepada anggota tim, termasuk juga penugasan anggota tim yang berpengalaman secara tepat ke bagian area yang mungkin beresiko tinggi dalam salah saji material.
6. Penganggaran keterlibatan termasuk dalam mempertimbangkan jumlah waktu yang tepat untuk area yang mungkin memiliki resiko salah saji material yang lebih tinggi.
7. Hasil dari audit sebelumnya yang melibatkan evaluasi efektivitas operasi pengendalian internal, termasuk sifat kelemahan yang teridentifikasi serta tindakan yang diambil untuk mengatasinya.
8. Bukti komitmen manajemen terhadap desain dan operasi pengendalian internal yang sehat termasuk bukti dokumentasi yang tepat atas pengendalian internal tersebut.
9. Volume transaksi yang bisa menentukan apakah lebih efisien untuk auditor jika mengandalkan pengendalian internal.
10. Perkembangan bisnis yang signifikan mempengaruhi entitas, termasuk perubahan dalam teknologi informasi dan proses bisnis, perubahan structural manajemen dan aktivitas akuisisi, merger dan divestasi.

11. Perubahan yang signifikan dalam kerangka pelaporan keuangan, misalnya perubahan dalam standar akuntansi.
12. Perkembangan relevan lainnya yang signifikan, misalnya perubahan dalam lingkungan hukum yang mempengaruhi entitas.

2. E-2 Audit Planning Memorandum

a. *Intended Scope of Audit Work*

Audit scope merupakan format yang harus didokumentasikan oleh KAP dalam perencanaan audit serta harus memenuhi beberapa hal berikut:

1. *Details of Significant Audit Risk*

Pada bagian ini akan menjelaskan tentang resiko signifikan apa saja yang mungkin dapat terjadi oleh klien. Untuk melakukan penilaian terhadap resiko signifikan dapat berasal dari resiko bawaan, resiko pengendalian, dan opini auditor yang telah ditentukan sebelumnya. Resiko signifikan akan dijelaskan secara rinci dan terpisah pada bagian E-5 *Assesment Significant Risk and Commentary*.

2. *Audit Plus Additional Service*

Pada bagian ini akan menyatakan jenis audit apakah yang diberikan oleh auditor kepada klien dalam satu ikatan tersebut. Jenis audit yang dimaksud dapat berupa pemeriksaan umum dan pemeriksaan khusus.

3. *By Whom and from Where*

Pada bagian ini akan menyatakan nama manajemen yang bertanggung jawab, biasanya yang akan menjadi penanggung jawab dari pihak manajemen yaitu direktur keuangan dan direktur utama dan pada bagian ini akan disebutkan nama sehingga dapat diketahui dengan jelas penanggung jawab atas suatu perikatan pada saat itu.

4. *Other Service and Network Contact, Telephon and Email Details*

Pada bagian ini akan menjelaskan tentang jenis jasa audit lain yang dilaksanakan selama penugasan. Pada beberapa kasus klien tertentu di tahun yang sama meminta KAP untuk melakukan audit lebih dari satu jenis jasa sehingga pada bagian ini harus dijelaskan dan disebutkan jenis jasa lain yang diberikan oleh KAP dan disertakan identitas dirinya.

5. *Ensure that Work Scope is Covered and Permitted by the Independence and Etichal Issues Commentary; also that it is Consistent with the Engagement Letter*

Pada bagian ini akan dijelaskan bahwa setiap perikatan mengharuskan auditor untuk mengisi *form* pernyataan independensi dan etika lainnya atas klien yang akan diauditnya. Pernyataan independensi yang dibuat oleh auditor harus konsisten dengan yang tertera pada *engagement letters* untuk memastikan objektivitas auditor terhadap klien yang diauditnya.

6. *Other Audit Firm*

Pada bagian ini akan menyatakan bahwa ada atau tidaknya KAP lain yang ada dalam satu masa audit yang sama. Kondisi ini dapat terjadi pada saat melakukan audit perusahaan yang memiliki anak atau melakukan audit laporan konsolidasian. Laporan keuangan yang diaudit oleh KAP lain harus dinyatakan pada bagian ini.

7. *Internal Audit Function*

Pada bagian ini akan menyatakan ada atau tidaknya fungsi auditor internal atas pengendalian internal yang terdapat pada perusahaan klien. Jika ada maka diisi dengan seberapa efektif dan berpengaruh audit internal terhadap operasional perusahaan. Hal ini dilakukan sebagai penilaian awal atas resiko pengendalian perusahaan klien.

8. *Other Professionals and Experts Where any Reliance is to be Placed on Their Work*

Pada bagian ini akan dilengkapi apabila terdapat jasa professional lain pada klien yang sama dalam menangani perusahaan. Hal ini harus dinyatakan untuk menentukan prosedur audit selanjutnya dalam melakukan *inquiry* pada jasa professional tersebut.

b. *Commercial and Financial Environment*

Pada tahap ini terdapat dua bagian yaitu *Accounting System and Control Environment* dan *Financial Reporting Environment*. Pada bagian *Accounting System and Control Environment* akan menjelaskan tentang *software* akuntansi yang digunakan oleh perusahaan klien dan bagaimana pengaruh sistem akuntansi tersebut terhadap pengendalian internal perusahaan. Sedangkan *Financial Reporting Environment* akan menyatakan bahwa perusahaan klien telah menyiapkan laporan keuangan dengan lengkap dan akurat; perusahaan klien telah menyiapkan laporan manajemen secara berkala; apakah laporan tersebut bisa diandalkan; apakah laporan manajemen yang disajikan sudah diperiksa oleh pihak yang berwenang; dan apakah ada faktor-faktor lain yang berpengaruh. Semua pernyataan tersebut akan didapatkan melalui pengamatan dokumen klien.

c. *Overall Approach to Components of Financial Statements*

Pada tahap ini akan membandingkan saldo setiap komponen di laporan keuangan tahun berjalan dengan saldo laporan keuangan yang telah diaudit pada tahun sebelumnya. Masing-masing setiap komponen atas laporan keuangan akan tertuju pada kertas kerja setiap komponen. Setelah itu akan memberikan kesimpulan atas kenaikan atau penurunan yang signifikan secara menyeluruh atas komponen *Profit and Loss* dan *Balance Sheet*. Kesimpulan yang diberikan berdasarkan analisis awal setelah auditor mendapatkan laporan keuangan. Setelah mendapat

laporan keuangan, auditor akan menganalisis dan menanggapi dengan mengidentifikasi akun apa saja yang memiliki resiko yang tinggi.

d. *Analytical Review*

Pada tahap ini akan ditentukan berdasarkan hasil analisis kenaikan dan penurunan atas saldo akun yang ada pada *Profit and Loss* dan *Balance Sheet*. Setelah itu, pada akun yang mengalami kenaikan dan penurunan secara signifikan akan diberikan alasan terhadap kenaikan dan penurunan tersebut dengan melakukan verifikasi kepada manajemen, baik yang berhubungan dengan akuntansi ataupun alasan penegndalian terhadap akun tersebut.

e. *Materiality Indicators*

Pada tahap ini untuk menentukan indicator perhitungan materialitas menggunakan komponen laba rugi dan neraca. Setelah menentukan basis materialitas, selanjutnya akan melakukan penilaian terhadap seluruh akun apakah saldo masing-masing akun kurang dari, sama dengan, atau lebih dari jumlah materialitas. Hal ini akan menentukan prosedur lanjutan apa yang akan dipilih atas akun tersebut.

f. *Overall Audit Approach Planned*

Pada tahap ini auditor akan menjelaskan bahwa melakukan prosedur audit dilakukan berdasarkan pemahaman tentang bisnis perusahaan, serta melakukan prosedur substantive dan tinjauan analitis pada akun-akun yang telah signifikan untuk mengurangi resiko ke tingkat yang dapat diterima. Sedangkan untuk melakukan prosedur audit pada akun-akun yang tidak dinyatakan material, tetap dapat dilakukan prosedur minimum yaitu konfirmasi saldo dan pemeriksaan fisik aset tetap.

g. *Sampling and Selection Approaches*

Pada tahap ini penentuan sampel dapat dibedakan berdasarkan golongan total populasi. Dalam penggolongan populasi terdapat empat level yaitu, level pertama golongan populasi besar (*large populations*), level kedua populasi menengah (*medium populations*), level ketiga populasi kecil (*small populations*), dan level keempat populasi sangat kecil (*very small population*).

Dalam menentukan jumlah sampel level pertama digunakan apabila populasi data klien yang diaudit termasuk dalam golongan populasi besar (*high populations*) yaitu populasi sebanyak lebih dari 250 items per tahun. Pertama, untuk menentukan jumlah sampel berdasarkan pada resiko pengendalian (*control risk*) dan resiko bawaan (*inherent risk*) yang terjadi pada bisnis klien. Selanjutnya, setelah menentukan tingkat resiko pengendalian dan resiko bawaan akan dilakukan penentuan jumlah secara lebih pasti dilihat dari berbagai kondisi.

Kondisi pertama, yaitu apabila resiko pengendalian tinggi dan resiko bawaan tinggi maka sampel yang diambil tidak terbatas atau mencapai 100% dikarenakan resiko salah saji material yang terjadi pada klien tersebut juga sangat tinggi. Sampel yang diambil sampai 100% bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan auditor terhadap proses bisnis klien telah dilaksanakan dengan wajar.

Kondisi kedua, yaitu apabila resiko pengendalian tinggi tetapi resiko bawaannya medium atau rendah. Kondisi ini dapat terjadi karena resiko bawaannya medium atau rendah namun tidak diiringi dengan pengendalian internal yang dilakukan oleh klien, sehingga menyebabkan resiko pengendalian menjadi tinggi. Jumlah sampel yang

harus diambil auditor apabila resiko pengendalian tinggi namun resiko bawaan rendah yaitu sejumlah 48.

Kondisi ketiga, yaitu apabila resiko pengendalian medium sedangkan resiko bawaannya tinggi. Resiko bawaan atas bisnis klien tinggi tetapi pengendalian internal yang dilakukan klien dapat mengurangi resiko bawaan sehingga mengakibatkan turunnya resiko pengendalian ke tingkat medium. Jumlah sampel yang harus diambil oleh auditor apabila resiko pengendalian medium sedangkan resiko bawaannya tinggi yaitu sejumlah 48.

Kondisi keempat, yaitu apabila resiko pengendalian tinggi namun resiko bawaan rendah atau sebaliknya, maka jumlah sampel yang harus diambil oleh auditor yaitu sejumlah 33 sampel. Jumlah sampel 33 ini adalah jumlah medium antara 48, 33, 17 dan 7 sampel. Jumlah sampel 33 ini dipilih karena posisi resiko pengendalian dan resiko bawaan dalam keadaan yang seimbang. Maka apabila resiko pengendaliannya tinggi namun resiko bawaannya rendah berarti bahwa bisnis klien merupakan bisnis dengan resiko bawaan yang rendah akan salah saji material, pada saat keadaan seperti ini tentu tidak dilakukannya pengendalian yang rumit sehingga menimbulkan terjadinya resiko pengendalian yang tinggi. Begitu pula sebaliknya, apabila posisi resiko pengendalian rendah namun resiko bawaannya tinggi berarti bisnis klien adalah bisnis dengan resiko bawaan yang tinggi tetapi diikuti dengan pengendalian yang baik sehingga resiko pengendalian menjadi rendah.

Kondisi kelima, yaitu apabila resiko pengendalian rendah resiko bawaannya rendah atau sebaliknya, maka jumlah sampel yang harus diambil oleh auditor yaitu sejumlah 17 sampel dikarenakan pengendalian yang dilakukan oleh klien dapat dikatakan memadai.

Sehingga, kesalahan pencatatan atau penyajian suatu transaksi akan rendah dan auditor hanya perlu mengumpulkan sampel sebanyak 17 untuk mewakili seluruh populasi yang ada.

Kondisi terakhir, yaitu apabila resiko pengendalian dan resiko bawaannya rendah maka jumlah sampel yang harus diambil oleh auditor yaitu cukup sejumlah 7 sampel yang berarti bahwa bisnis klien tidak beresiko akan adanya salah saji material, dan pengendalian yang dilakukan oleh perusahaan telah memadai. Sehingga, sampel yang perlu dikumpulkan auditor cukup sejumlah 7 untuk mewakili seluruh populasi yang ada.

Menentukan jumlah sampel level kedua dapat digunakan apabila populasi data pada klien yang diaudit termasuk dalam golongan populasi medium (*medium populations*) yaitu populasi sebanyak antara 52 sampai dengan 250 *items* per tahun.

Menentukan jumlah sampel level ketiga dapat digunakan apabila populasi data pada klien yang diaudit termasuk dalam golongan populasi kecil (*small population*) yaitu populasi sebanyak 12 *items* sampai dengan 52 *items* per tahun.

Menentukan jumlah sampel level keempat dapat digunakan apabila populasi data pada klien yang diaudit termasuk dalam golongan populasi sangat kecil (*very small population*) yaitu populasi sebanyak sampai dengan 12 *items* per tahun.

h. *Staffing on Assigment*

Langkah selanjutnya dalam desain perencanaan audit pada KAP yaitu *staffing*, berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Rahmi penentuan *staffing* dilakukan pada saat diskusi tim sebelum penugasan. Proses

staffing ini ditentukan oleh manajer. Manajer akan melakukan alokasi staf berdasarkan kemampuan atau pengalaman audit pada tahun sebelumnya serta menilai hasil kerja staf tersebut pada pekerjaan yang telah diselesaikan.

Tujuan dari pengalokasian staf adalah untuk mencapai tujuan audit secara efisien dan hemat biaya. Pada langkah ini berisikan rincian penentuan staf mulai dari junior, senior, manajer dan partner. Sedangkan tujuan proses perencanaan audit ini adalah untuk memastikan semua staff yang terlibat dalam audit mengetahui secara keseluruhan atas pertimbangan perencanaan dan tanggung jawab spesifik yang akan mereka jalani. Semua ini harus dicapai dengan memberikan pengarahan sepenuhnya kepada semua staf yang terlibat di dalam melakukan penugasan audit melalui *audit strategy memorandum* dan *audit panning memorandum*.

i. *Overall Audit Approach by Caption*

Pada langkah yang kesembilan yaitu pendekatan audit per area, langkah terakhir ini akan menentukan area mana yang memiliki resiko yang signifikan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Rahmi pendekatan audit per area ini bertujuan untuk menentukan atau mengidentifikasi resiko salah saji yang mungkin terjadi pada setiap siklus bisnis dan akan mempengaruhi opini.

j. *Assignment Timetable and Responsibility*

Time table ini akan digunakan sebagai jadwal dalam satu periode audit, mulai dari *team briefing* sampai dengan *audit report date*. Langkah tersebut harus dilengkapi dengan tanggal masing-masing tahapan

diproses sampai dengan selesai serta dicantumkan nama dan tanda tangan pihak yang bertanggung jawab atas tahap tersebut. Proses ini bertujuan sebagai acuan dan target atas suatu perikatan audit.

3. E-3 Assessment of Fraud Risk

Penilaian atas resiko kecurangan didokumentasikan bertujuan untuk melakukan penilaian awal dari salah saji material atas kecurangan berdasarkan skeptisme professional auditor yang sesuai sebagai bagian dari proses perencanaan audit.

a. Assessment of Fraud by Management

Dalam menilai resiko kecurangan manajemen, lebih baik terlebih dahulu melakukan konfirmasi kepada manajemen yang bertanggung jawab dalam satu perikatan yang diwakili oleh Direktur Utama atau Direktur Keuangan. Selanjutnya, penilaian atas resiko bawaan dinilai dari sector bisnis perusahaan. Resiko bisnis perusahaan akan dinilai dari pengakuan pendapatan, pendapatan merupakan akun yang dapat dikatakan memiliki resiko kecurangan yang paling tinggi, karena pada akun ini sangat mungkin untuk manajemen meningkatkan laba, ekuitas yang akan berpengaruh pada *balance sheet* perusahaan.

Setelah itu, auditor akan melakukan penilaian atas resiko kecurangan yang timbul dari keterbatasan pengendalian internal. Untuk melakukan dokumentasi pada tahap ini maka harus didapatkan mengenai pernyataan manajemen atas tata kelola perusahaannya, selanjutnya auditor akan menilai resiko kecurangan atas tata kelola perusahaan tersebut pada posisi rendah, menengah atau tinggi disertakan dengan alasannya.

Tahap selanjutnya auditor akan menjelaskan teknik manajemen untuk mengidentifikasi resiko kecurangan dan kontrol yang relevan atas

operasional perusahaan. Pada tahap ini akan diisi dengan metode pengendalian apa yang diangkat oleh perusahaan untuk menilai dan mengevaluasi pengendalian internalnya sebagai cara untuk mencapai tujuan pada bisnisnya. Selain itu akan dijelaskan juga peran internal auditor dalam mengawasi sistem pengendalian internal untuk memberikan kepastian yang memadai bahwa pengendalian internal yang telah dilakukan sudah efektif dan efisien sesuai dengan prosedur operasi standar yang telah ditetapkan. Penilaian atas risiko kecurangan dinilai berdasarkan pengakuan pendapatan. Selanjutnya, penilaian risiko yang signifikan akan lebih lanjut dibahas pada indeks E-4 *Audit Risk Assessment and Commentary*.

b. *Assessment of Risk Environment*

Pada bagian ini akan menyajikan identifikasi risiko yang ditemukan sebagai penerapan dalam menilai risiko pengendalian, risiko yang akan diidentifikasi yaitu risiko yang berlaku untuk laporan keuangan, faktor risiko yang mungkin terjadi pada penyalahgunaan aset, serta faktor risiko lain yang mungkin terjadi selain pada laporan keuangan dan penyalahgunaan aset.

Penilaian atas risiko kecurangan yang dapat digunakan sebagai penerapan dalam pelaporan keuangan yaitu karakteristik manajemen, karakteristik sektor bisnis dan karakteristik entitas bisnis. Penilaian atas risiko kecurangan yang mungkin terjadi pada penyalahgunaan aset dapat dinilai pada aset-aset yang mungkin dapat digunakan sebagai objek penyalahgunaan serta akan dinilai pada tahap awal dan akhir. Penilaian atas faktor risiko yang mungkin terjadi selain pada laporan keuangan dan penyalahgunaan aset berdasarkan *adjustment* yang bersifat umum mengenai laporan keuangan. Format yang harus

dipenuhi dalam penilaian masing-masing resiko kecurangan terdapat pada format E-5 *Assessment of Fraud Risk*.

Setelah ketiga area diidentifikasi, selanjutnya akan didokumentasikan untuk menentukan pendekatan audit yang tepat untuk memitigasi resiko kecurangan yang dapat terjadi dengan cara merancang prosedur audir secara tepat dan rinci selama dalam pelaksanaan audit. Jika kecurangan dapat diidentifikasi, maka lakukan pertimbangan implikasinya untuk faktor-faktor lain yang menjadi komponen penilaian atas resiko kecurangan secara keseluruhan, jika diperlukan maka lakukan evaluasi ulang. Hal ini akan mengakibatkan perubahan perencanaan audit secara terperinci. Auditor juga harus memastikan seluruh transaksi selama periode melaksanakan audit, khususnya memperpanjang durasi sampel sampai akhir periode pada saat pengujian transaksi telah dilakukan.

Pada saat melakukan penilaian atas resiko kecurangan yang merugikan, terdapat form untuk menilai resiko tersebut dan melakukan pendekatan dengan dua cara yaitu pendekatan pada tingkat asersi dan pendekatan pada tingkat laporan keuangan yang berhubungan dengan pelaporan keuangan yang telah diidentifikasi terdapat kecurangan. Pada form E-3 *Assessment of Fraud Risk* akan disajikan dua pendekatan tersebut untuk dilengkapi oleh auditor apabila klien teridentifikasi kecurangan, atau juga dapat menuliskan N/A jika klien tidak teridentifikasi kecurangan.

c. *Conclusion at the Intial Planning Stage*

Pada bagian ini akan menuliskan tentang kesimpulan atas perencanaan awal terhadap penilaian resiko kecurangan yang dilengkapi dengan pernyataan ada atau tidaknya resiko kecurangan tersebut dan akan

dijelaskan juga pada siklus mana resiko tersebut terjadi. Setelah itu, tahap perencanaan awal atas penilaian resiko kecurangan akan diperiksa dan ditanda tangani oleh partner in *charge*.

d. *Confirmation of Risk Environment at Completion Stage*

Sebagai bagian dari tahap peninjauan dan penyelesaian, auditor wajib melakukan pertimbangan apakah penilaian awal terhadap resiko sudah benar dan berdasarkan pekerjaan verifikasi yang dilakukan, apakah masih ada faktor yang tidak dipekirakan muncul selama audit dan apakah tanggapan semua atas resiko yang teridentifikasi sudah cukup untuk memberikan jaminan bahwa tidak akan ada salah saji material atas informasi keuangan atau penyalahgunaan aset.

Pada tahapan ini akan dijelaskan faktor tambahan yang telah diidentifikasi selama masa audit dan prosedur yang dipilih termasuk juga pernyataan manajemen, yang member jaminan bahwa tidak ada salah saji material atas informasi keuangan dan penyalahgunaan aset. Pada tahapan ini juga auditor akan memberikan alasan bahwa ada faktor yang sudah diidentifikasi pada tahap perencanaan audit tetapi tidak dijalankan pada tahapan audit.

e. *Completion and Clearence*

Saat penilaian resiko kecurangan sudah dilengkapi, selanjutnya apabila terdapat resiko kecurangan maka auditor harus membuat *management letter* yang berisikan poin-poin temuan atas kecurangan yang ditemukan oleh auditor di dalam penegndalian internal klien. Auditor juga harus menyertakan saran atas temuan tersebut.

f. *Conclusion at Completion Stage*

Pada tahap ini auditor akan membuat kesimpulan atas penilaian resiko kecurangan dengan pernyataan bahwa semua tujuan penilaian atas resiko kecurangan yang di nilai sudah terpenuhi, serta memberikan pernyataan juga bahwa ada atau tidaknya salah saji material atas informasi keuangan atau penyalahgunaan aset karena adanya tindak kecurangan. Setelah tahap ini dibuat, akan ditandatangani oleh Manajer *in charge* dan diperiksa serta disetujui oleh partner *in charge*.

4. E-4 Audit Risk Assessment and Commentary

a. *Details of Sognificant Audit Risk*

Pada bagian ini akan menjelaskan tentang format resiko signifikan yang harus dijelaskan pada pendokumentasian dalam perencanaan audit. Pertama, auditor akan melakukan penilaian menyeluruh atas lingkungan pengendaliannya, yang akan diisi dengan pernyataan auditor bahwa manajemen sudah menyadari pentingnya pengendalian internal terhadap perusahaan, gaya manajemen yang ikut dalam mempengaruhi pengendalian internal, manajemen harus memiliki pengalaman dalam bisnis yang dijalani, serta struktur organisasi manajemen yang telah dibuat dengan baik dengan orang yang berkompeten dibidangnya.

Kedua, akan menjelaskan tentang faktor-faktor resiko bawaan. Faktor yang harus dinilai yaitu faktor yang menjelaskan bisnis klien, serta dari faktor lainnya yang dapat mempengaruhi resiko bawaan pada klien. Setelah menjelaskan tentang resiko bawaan, selanjunya resiko yang dinilai lainnya yaitu faktor-faktor resiko pengendalian, pada bagian ini auditor akan menilai apakah pengendalian yang telah dilakukan

klien sudah cukup untuk memberikan keyakinan atas laporan keuangan yang dibuat oleh manajemen.

Selanjutnya, setelah menyatakan resiko bawaan dan resiko pengendalian maka yang dinilai berikutnya yaitu resiko signifikan. Dalam tahapan perencanaan audit, resiko yang signifikan dinyatakan berdasarkan penilaian resiko awal pada keseluruhan laporan keuangan. Tahap selanjutnya akan menjelaskan tentang penilaian resiko signifikan yang terdapat pada laporan keuangan. Semua asersi manajemen akan dinilai berdasarkan resiko bawaan dan resiko pengendalian. Pada tahap ini akan diisi dengan mengidentifikasi resiko bawaan dan resiko pengendalian terhadap masing-masing asersi yang dinyatakan dalam *high/medium/low*. Penilaian atas resiko akan diserahkan kepada manajer yang bertugas dan akan dinilai berdasarkan *judgement* manajer.

5. E-5 Planning and Performance Materiality

Pada bagian ini merupakan penjelasan dari subbab *Materiality Indicators* pada indeks E-2 *Audit Planning Memorandum*. Pada bagian ini akan menjelaskan tentang cara menentukan materialitas. Materialitas yang telah ditentukan dibagi menjadi tiga, yaitu *planning materiality*, *performance materiality* atau *tolerable error*, dan *nominal account*. Sedangkan terdapat empat basis dalam menentukan jumlah *planning materiality* yaitu total aset, total pendapatan, total ekuitas dan laba sebelum pajak. Apabila menggunakan total aset maka persentase yang digunakan yaitu sebesar 2%. Apabila menggunakan total pendapatan atau total ekuitas maka persentase yang digunakan yaitu sebesar 5%. Apabila menggunakan laba sebelum pajak maka persentase yang ditentukan sebesar 5% dari laba sebelum pajak itu sendiri. Dalam melakukan penentuan basis yang

digunakan dalam menentukan besarnya materialitas yaitu berdasarkan *judgement* manajer yang bertugas.

Dalam menghitung *tolerable error* menggunakan basis berdasarkan penilaian resiko atas resiko penegndalian dan resiko bawaan. Apabila analisis penilaian resiko rendah maka persentase yang digunakan untuk menghitung TE sebesar 50% dari *planning materiality*. Apabila analisis penilaian resiko medium maka persentase yang digunakan untuk menghitung TE sebesar 30% dari *planning materiality*. Apabila analisis penilaian resiko tinggi maka persentase yang digunakan untuk menghitung TE sebesar 15% dari *planning materiality*. Ketentuan ini merupakan afiliasi dari KAP XXX.

Dalam menghitung *nominal account* yaitu persentase yang digunakan antara 5-10% dari *planning materiality*. Persentase yang telah ditentukan merupakan hasil dari *judgement* dari manajer yang bertugas.

Pada bagian yang terakhir akan memberikan penjelasan atas keputusan penggunaan dari masing-masing basis perhitungan pada masing-masing jenis materialitas. *Summary of materiality factors* akan menjelaskan tentang kesimpulan atas *performance materiality* yang dipilih dan disajikan dengan jumlah nominal berdasarkan perhitungan yang telah dijelaskan serta ditentukan berdasarkan *judgement* manajer yang bertugas.

4.2.2 Membandingkan Desain Perencanaan Audit dengan Operasional

Operasional perencanaan audit atas laporan keuangan akan dibahas pada suatu klien yang bergerak dibidang koperasi simpan pinjam. Perencanaan audit pada koperasi simpan pinjam akan dijadikan sebagai data perbandingan atas

perencanaan audit laporan keuangan dengan desain perencanaan audit pada KAP XXX.

Metode pengumpulan data perencanaan audit pada KAP XXX dilakukan dengan cara melakukan wawancara dan dokumentasi atas perencanaan audit dilakukan pada saat peneliti melakukan observasi. Hasil dari wawancara yang telah dilakukan bersama Ibu Rahmi selaku auditor di KAP XXX, didapatkan informasi bahwa perencanaan audit yang dilakukan di KAP XXX mengacu pada Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP).

Pada subbab ini akan menjawab rumusan masalah yang pertama yaitu “Apakah perencanaan audit atas laporan keuangan yang dilakukan pada KAP XXX telah sesuai dengan desain perencanaan audit atas laporan keuangan KAP XXX?”. Selama peneliti melakukan observasi dari bulan Januari hingga Maret 2019, peneliti melakukan pengamatan dan pekerjaan lapangan, sehingga pada subbab bagian ini peneliti akan menganalisis kesesuaian pendokumentasian dan pelaksanaan atas perencanaan audit pada KAP XXX dengan desain yang telah dijabarkan apada subbab sebelumnya.

Data yang akan digunakan dalam melakukan pengujian terhadap kesesuaiannya yaitu perencanaan audit atas laporan keuangan pada koperasi simpan pinjam. Tabel 4.1 di bawah ini akan menampilkan perbandingan perencanaan audit antara dokumentasi perencanaan audit pada koperasi simpan pinjam dengan desain perencanaan audit pada KAP XXX.

Tabel 4.1

Perbandingan Perencanaan Audit antara Operasional Koperasi Simpan Pinjam dan KAP

Dokumentasi Perencanaan Audit pada Koperasi Simpan Pinjam	Perencanaan Audit pada KAP XXX
<ol style="list-style-type: none"> 1. Karakteristik Perikatan <ol style="list-style-type: none"> a. Ruang lingkup audit b. Kegiatan Bisnis Entitas 2. Tujuan pelaporan, saat pelaporan dan sifat komunikasi <ol style="list-style-type: none"> a. Tujuan laporan keuangan entitas b. <i>Time table</i> 3. Arahkan audit <ol style="list-style-type: none"> a. Identifikasi resiko b. Pendekatan audit 4. Penentuan materialitas 5. Sampling 6. <i>Staffing</i> 7. Asersi Manajemen 8. Pendekatan audit per area 	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>E-1 Audit Strategy Memorandum</i> <ol style="list-style-type: none"> a. <i>The Entity's Business</i> b. <i>Reporting Objective, Timing of the Audit and Communications Required</i> c. <i>Direction of the Audit</i> 2. <i>E-2 Audit Planning Memorandum</i> <ol style="list-style-type: none"> a. <i>Intended Scope of Audit Work</i> b. <i>Commercial and Financial Environment</i> c. <i>Overall Approach to Components of Financial Statement</i> d. <i>Analytical Review</i> e. <i>Materilaity Indicators</i> f. <i>Overall Audit Approach Planned</i> g. <i>Sampling and Selection Approach</i> h. <i>Staffing on Assignment</i> i. <i>Overall Audit Approach by Caption</i> j. <i>Assignment Timetable and Responsibility</i>

	<p>3. E-3 <i>Assessment of Fraud Risk</i></p> <p>4. E-4 <i>Audit Risk Assessment and Commentary</i></p> <p>5. E-5 <i>Palnning and Performance Materiality</i></p>
--	---

Sumber: Olahan Peneliti

Berdasarkan gambar 4.1 dapat disimpulkan bahwa pada analisis awal berdasarkan format penyusunan perencanaan audit atas laporan keuangan pada Koperasi Simpan Pinjam sudah sesuai dengan desain perencanaan audit pada KAP XXX.

Sebelum membahas tentang perencanaan audit pada Koperasi Simpan Pinjam, proses wawancara dimulai dengan membahas proses penerimaan perikatan pada klien yaitu Koperasi Simpan Pinjam. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Ibu Rahmi selaku auditor di KAP XXX, proses penerimaan perikatan pada klien pertama biasanya mendapat surat permintaan penawaran audit dari calon klien. Setelah itu akan dilakukan survey lapangan seperti mendatangi perusahaan, melihat data-datanya, dilihat kesiapan datanya. Setelah dilihat cukup memadai barulah akan dilakukan pemeriksaan audit dan akan diterima sebagai klien.

Setelah dinyatakan sebagai klien, selanjutnya akan memasuki tahap pendokumentasian perencanaan audit atas laporan keuangan. Pada langkah awal dalam menyusun perencanaan audit, auditor akan menilai karakteristik perikatan sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SPK). Dalam SPK berisikan tentang lingkup audit atas laporan keuangan tahun berjalan, *fee audit* dan term pembayaran, hasil audit yang diminta, jangka waktu pelaksanaan, pusat pertanggung jawaban pada

klien, sanksi dan denda, serta jaminan atau garansi. Selanjutnya, penjelasan tahapan perencanaan audit atas laporan keuangan akan dijelaskan sebagai berikut.

1. Karakteristik Perikatan

a. Ruang Lingkup Audit

Pelaksanaan atas penyusunan ruang lingkup audit dibuat berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) dan *engagement letters* yang sudah disepakati oleh dua belah pihak.

Dokumentasi mengenai ruang lingkup audit akan menghasilkan kesimpulan bahwa seluruh tim yang bertugas pada klien sudah memahami jenis perikatan yang dijalani, jadwal laporan hasil audit, dan sampai sejauh mana rasa tanggung jawab auditor terhadap laporan keuangan atau ruang lingkup kerja auditor. Adanya karakteristik ruang lingkup audit pada klien terdiri dari audit umum dan audit kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu, ruang lingkup audit juga akan menjelaskan tentang pemeriksaan laporan kinerja. Tujuan dari laporan kinerja adalah untuk memberikan keyakinan dalam hal material, kesesuaian laporan kinerja dengan pedoman penilaian untuk tingkat kesehatan sesuai dengan peraturan pemerintah tentang usaha yang bergerak di bidang simpan pinjam.

Setelah itu, ruang lingkup audit juga akan menjelaskan tentang tujuan audit atas laporan keuangan secara umum, menyampaikan isi dari *engagement letters* untuk mengkomunikasikan penilaian awal terhadap pengendalian internal, pernyataan jenis laporan yang akan dihasilkan harus sesuai dengan dasar penyusunan, dan menghasilkan laporan keuangan dari perikatan ini.

Ruang lingkup audit yang didokumentasikan berdasarkan desain perencanaan audit pada KAP XXX pada indeks E-1 *Audit Strategy Memorandum* dan penjelasan lebih rinci pada indeks E-2 *Audit Planning Memorandum* pada bagian *The Entity's Business* dan *Intended Scope of Audit Work*. Perencanaan audit atas laporan keuangan pada Koperasi Simpan Pinjam sudah dijelaskan sesuai dengan kondisi pada Koperasi Simpan Pinjam.

b. Kegiatan Bisnis Entitas

Pelaksanaan atas penyusunan kegiatan bisnis entitas dibuat berdasarkan pengalaman audit tahun lalu, kertas kerja tahun lalu, Surat Perintah Kerja (SPK) dan *engagement letters* yang sudah disepakati oleh dua belah pihak.

Kegiatan bisnis pada Koperasi Simpan Pinjam yaitu berupa kegiatan usaha yang berkaitan dengan kegiatan anggota usaha misalnya unit usaha simpanan, pinjaman, dan pendidikan. Pada bagian ini akan dijelaskan satu persatu tentang program yang ada pada Koperasi Simpan Pinjam tersebut, hal ini dimaksudkan agar seluruh tim audit mengetahui mengetahui dan memahami jenis usaha yang ada pada Koperasi Simpan Pinjam. Selain itu, informasi tentang Koperasi Simpan Pinjam sangat diperlukan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan pada saat pelaksanaan audit.

Pada bagian kegiatan bisnis entitas ini akan didokumentasikan dengan tujuan agar seluruh tim audit memahami bisnis kliennya, hal ini juga sangat penting karena untuk dapat mengetahui resiko bisnis klien dan resiko bawaan, yang nantinya akan mempengaruhi pengambilan keputusan berdasarkan kearifan profesionalitasnya.

Berdasarkan hasil analisis di atas, jika dilihat dari tahap awal desain perencanaan audit pada KAP telah sesuai yaitu menjelaskan tentang *entity's business* dan *scope of audit work*. Sehingga dapat disimpulkan bahwa operasional perencanaan audit sudah sesuai dengan desain perencanaan audit pada KAP.

2. Tujuan Pelaporan, Saat pelaporan, dan Sifat Komunikasi

a. Tujuan Pelaporan

Berdasarkan penjelasan yang telah disebutkan di atas, bahwa tujuan pelaporan perikatan ini tidak hanya untuk memberikan keyakinan atas laporan keuangan, tetapi juga pada laporan kepatuhan dan laporan kinerja. Tujuan pelaporan pada bagian ini lebih dikhususkan pada tujuan pelaporan atas program yang ada pada Koperasi Simpan Pinjam.

Peraturan perundang-undangan digunakan sebagai acuan dalam penyelesaian audit atas laporan keuangan. Pendokumentasian peraturan perundang-undangan dimaksudkan agar seluruh tim audit dapat memahami peraturan tersebut. Sehingga pada saat pelaksanaan audit, auditor tidak lagi mencari peraturan yang berhubungan dengan Koperasi Simpan Pinjam tersebut, karena semua peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan Koperasi Simpan Pinjam sudah tercantum dalam perencanaan audit.

b. Saat Pelaporan

Saat pelaporan atau *time table* disusun berdasarkan kearifan profesional manajer yang telah ditentukan dengan mengacu pada tanggal awal perikatan dan tanggal awal pelaporan yang ada pada SPK dan *engagement letters* yang sudah disepakati oleh dua belah pihak.

Tidak ada ketentuan mutlak bagi KAP XXX tentang penyusunan *time table*. Sehingga, jangka waktu pekerjaan yang telah ditentukan berdasarkan ketentuan manajer dengan kesepakatan dari tim audit.

Pada saat pelaporan akan menjelaskan tentang waktu pelaksanaan audit yang dituangkan dalam *time table* sebagaimana yang telah dijelaskan pada subbab sebelumnya. *Time table* akan menyajikan waktu dan penanggung jawab selama audit dilaksanakan mulai dari perencanaan audit, pelaksanaan, sampai dengan pelaporan audit. Format dalam pendokumentasian *time table* menggunakan format dari KAP XXX, sehingga tidak ada perbedaan apapun. Pendokumentasian oada *time table* bertujuan agar seluruh tim audit yang bertugas mengetahui jadwal pekerjaan tahapan, sehingga tidak menimbulkan penyajian laporan keuangan audit yang tergesa-gesa.

Pada bagian ini, pendokumentasian tujuan pelaporan, saat pelaporan, dan sifat komunikasi sudah sesuai dengan desain perencanaan audit pada KAP XXX pada indeks E-1 *Audit Strategy Memorandum* pada bagian *Reporting Objective* dan *Timing of the Audit and Communications Required*. Berdasarkan hasil dari kesesuaian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa operasional perencanaan audit sudah sesuai dengan desain perencanaan audit pada KAP.

3. Arahan Audit

a. Identifikasi Resiko

Identifikasi resiko awal akan dibuat berdasarkan pemahaman audit tahun lalu, SOP terbaru, melakukan *inquiry* dengan manajemen tentang implementasi SOP pada operasional perusahaan, dan melakukan prosedur *walkthrough* sebagai alat untuk menguji dokumen. Pelaksanaan dalam identifikasi resiko tersebut dilakukan

agar mendapatkan pemahaman tentang pengendalian internal yang dilakukan oleh klien, apakah sudah memadai ataukah tidak. Hasil dari identifikasi resiko akan didokumentasikan pada tahap ini dan akan digunakan sebagai pertimbangan atas penilaian resiko pengendalian pada Koperasi Simpan Pinjam.

Pelaksanaan identifikasi resiko selain dengan melakukan prosedur di atas, dapat juga didokumentasikan oleh auditor dengan membagi dua hasil dokumentasi yaitu identifikasi resiko atas bisnis dan identifikasi resiko signifikan yang mungkin terjadi dalam proses bisnis klien.

Resiko bawaan pada Koperasi Simpan Pinjam dapat dikategorikan sebagai *high risk* karena Koperasi Simpan Pinjam merupakan bidang usaha yang dipengaruhi oleh ekonomi masyarakat atau banyaknya nasabah yang tergabung didalamnya. Sedangkan pada resiko signifikan awal dapat diidentifikasi berdasarkan kinerja dan status kepemilikan salah satu aset yang akan mempengaruhi pangakuan akuntansi secara signifikan. Pelaksanaan identifikasi resiko ini sangat penting karena akan mempengaruhi sampel dan keputusan auditor pada tahap perencanaan audit berikutnya.

b. Pendekatan Audit

Pendekatan audit akan menjelaskan tentang penilaian atas resiko pengendalian dan keputusan untuk melakukan *test of control* (TOC), TOC juga dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan sesuai dengan runag lingkup penugasan. Pengendalian internal pada Koperasi Simpan Pinjam dinilai kondusif untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya, oleh sebab itu perlu dilakukan TOC sebagai pendukung *judgement* awal auditor yang selanjutnya akan didokumentasikan.

Selain dilakukan TOC, dapat ditentukan juga akun-akun signifikan yang membutuhkan pengujian substantif yang akan diuji dengan *analytical review* dan *test of details*. Akun-akun signifikan pada Koperasi Simpan Pinjam yaitu akun bank, investasi, piutang, utang dan modal. Prosedur pengecekan fisik dilakukan dengan surat berharga dan aset tetap.

Pada tahap ini, merupakan tahap identifikasi resiko, baik resiko bawaan maupun resiko pengendalian, serta penentuan akun yang beresiko signifikan yang berada pada desain perencanaan audit pada KAP XXX.

Berdasarkan analisis di atas, identifikasi resiko dan pendekatan audit sudah sesuai dengan desain perencanaan audit pada KAP pada indeks E-1 *Audit Strategy Memorandum* pada bagian *Direction of the Audit*, serta dijelaskan secara lebih rinci tentang identifikasi resiko pada indeks E-2 *Audit Planning Memorandum* dan indeks E-4 *Audit Risk Assessment and Commentary*. Berdasarkan hasil pembahasan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa operasional perencanaan audit sudah sesuai dengan desain perencanaan audit pada KAP.

4. Penentuan Materialitas

Penentuan materialitas dihitung berdasarkan laporan keuangan periode tahun berjalan. Basis dalam perhitungan dan persentase yang digunakan berdasarkan format dan ketentuan dari KAP XXX yang telah disesuaikan dengan kondisi Koperasi Simpan Pinjam.

Basis materialitas yang digunakan untuk Koperasi Simpan Pinjam yaitu berdasarkan total pendapatan. Basis ini dipilih karena sebagian besar aset berasal dari pendapatan bunga pinjaman.

Penentuan materialitas pada KAP terbagi menjadi 3 kategori yaitu total aset, total pendapatan dan total laba sebelum pajak. Selain penentuan materialitas, persentase dalam menghitung materialitas juga harus ditentukan. Besaran persentase ditentukan berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak. Materialitas yang telah ditentukan akan dinyatakan dalam setiap *working paper* yang bertujuan untuk mengontrol nominal setiap akun yang akan mempengaruhi keputusan pengujian akun tersebut.

Berdasarkan hasil analisis di atas, maka dapat disimpulkan bahwa implementasi perencanaan audit pada Koperasi Simpan Pinjam sudah melakukan perhitungan materialitas sesuai dengan desain perencanaan audit pada KAP.

5. *Sampling*

Sampling akan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ada pada KAP yang sudah dijelaskan pada bagian sebelumnya. Penentuan jumlah *sampling* akan diambil berdasarkan pada jumlah populasi yang akan di audit. Hasil penentuan jumlah sampel akan digunakan pada tahap pengujian pengendalian maupun pengujian substantif.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa operasional dalam penentuan *sampling* sudah sesuai dengan desain perencanaan audit pada KAP yang terdapat pada indeks E-5 *Planning and Performance Materiality*.

6. Staffing

Penentuan *staffing* dilakukan oleh manajer dengan melakukan pertimbangan berdasarkan pengalaman audit sebelumnya, kinerja auditor, dan jabatan auditor. Selain untuk menentukan tim audit, *staffing* juga akan menentukan partner yang bertanggung jawab, manajer yang bertanggung jawab, ketua tim, dan staf junior auditor. Penentuan dalam *staffing* diumumkan pada saat awal akan melakukan audit dan seluruh staf akan menerima hasil pembagian tim audit, nama klien, dan masa audit.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Rahmi, proses penentuan *staffing* sudah terlaksana sesuai dengan perencanaan audit pada KAP. Pada pelaksanaan audit, tim audit tidak pernah mengalami kekurangan tenaga professional karena penentuan *staffing* sudah ditentukan sejak tahap awal perencanaan audit.

Secara keseluruhan sudah dapat disimpulkan bahwa format penugasan awal sudah sesuai dengan desain perencanaan audit pada KAP yaitu pada indeks E-2 *Audit Planning Memorandum* pada bagian *Staffing on Assignment*.

7. Asersi Manajemen

Asersi manajemen sudah didokumentasikan pada saat awal perencanaan audit, baik yang signifikan maupun yang tidak signifikan. Asersi manajemen didokumentasikan bertujuan untuk mengetahui tujuan audit yang akan dicapai pada saat proses pelaksanaan audit. Asersi manajemen akan didokumentasikan dalam Kertas Kerja Pemeriksaan (*working paper*) sesuai dengan tujuan audit yang harus dicapai pada setiap audit per akun.

Asersi manajemen dalam desain perencanaan audit pada KAP terdapat pada bagian penilaian resiko signifikan per akun. Sehingga asersi

manajemen akan disajikan bersamaan dengan penilaian resiko signifikan dan pendekatan audit per akun. Pada desain perencanaan audit KAP tidak terdapat perintah atau tahapan yang harus mencantumkan semua asersi.

Berdasarkan analisis di atas, operasional perencanaan audit atas asersi manajemen maka dapat disimpulkan bahwa operasional perencanaan audit atas laporan keuangan pada Koperasi Simpan Pinjam dapat dikatakan sudah sesuai dengan desain perencanaan audit pada KAP.

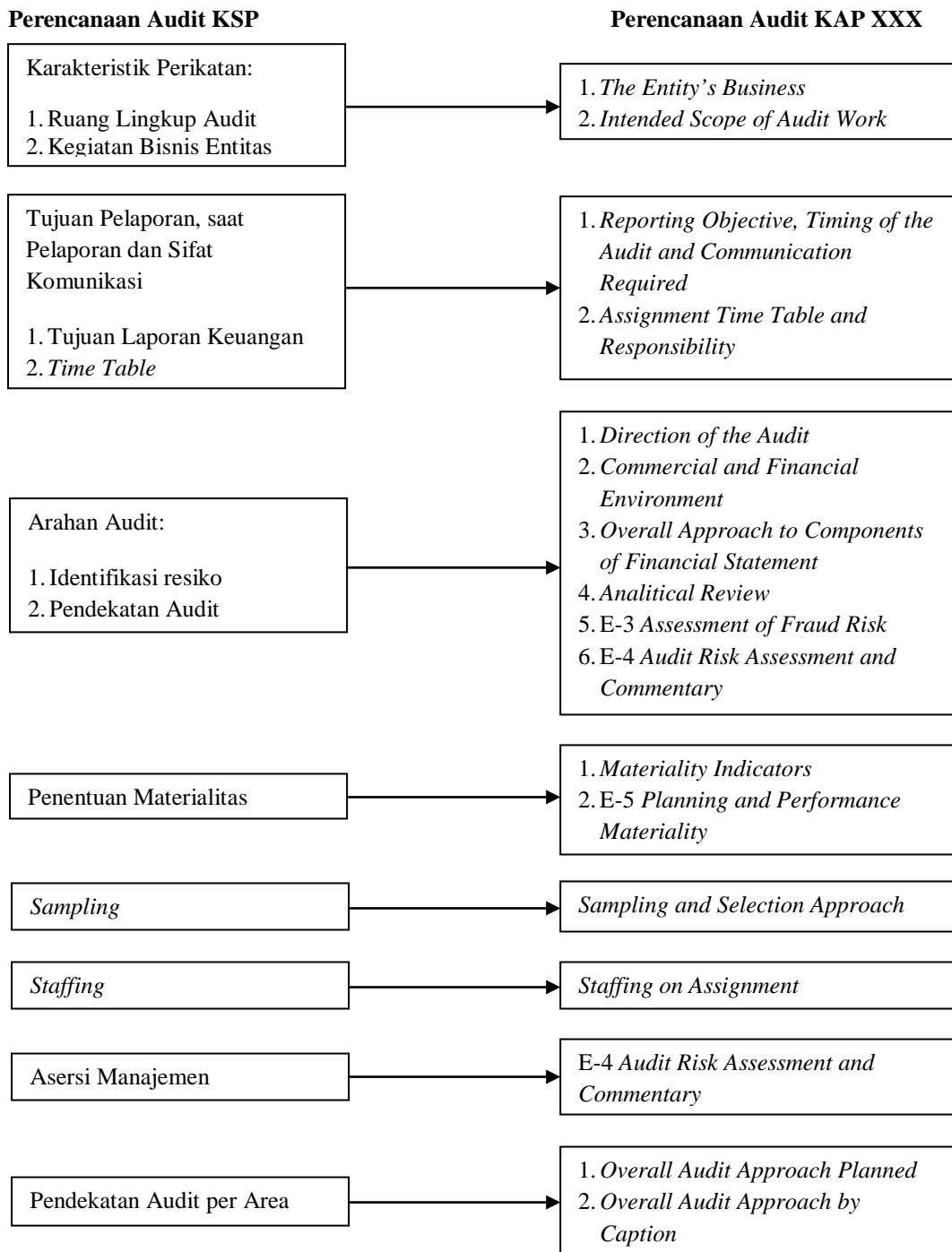
8. Pendekatan Audit per Area

Operasional pendekatan audit per area akan didokumentasikan berdasarkan format desain perencanaan audit yang ada pada KAP XXX. Berdasarkan pernyataan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa operasional perencanaan audit atas laporan keuangan sudah sesuai dengan desain perencanaan audit pada KAP yaitu pada indeks E-2 *Audit Planning Memorandum* pada bagian *Overall Audit Approach by Caption*.

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan pada perencanaan audit atas laporan keuangan pada Koperasi Simpan Pinjam maka dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan kegiatan operasional KAP pada bagian perencanaan audit sudah sesuai dengan desain perencanaan audit yang dibuat oleh KAP XXX. Berikut ini gambar 4.1 akan merangkum hasil pembahasan perbandingan antara dokumentasi perencanaan audit pada Koperasi Simpan Pinjam dengan desain perencanaan audit pada KAP XXX.

Gambar 4.1

Ringkasan Pembahasan



Sumber: Olahan Peneliti

4.2.3 Membandingkan Perencanaan Audit KAP XXX dengan SPAP

Pada subbab ini akan menjawab rumusan masalah yang kedua yaitu “Bagaimana perencanaan audit atas laporan keuangan yang ada pada KAP XXX berdasarkan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP)?”. Setelah mengetahui bagaimana perencanaan audit pada KAP XXX, maka perencanaan audit tersebut akan dibandingkan dengan perencanaan audit menurut SPAP. Tabel 4.2 dibawah ini akan menampilkan perbandingan perencanaan audit pada KAP XXX dengan perencanaan audit menurut SPAP.

Tabel 4.2

Perbandingan Perencanaan Audit pada KAP dengan SPAP

Perencanaan Audit SPAP	Perencanaan Audit KAP
1. Strategi audit menyeluruh	1. E-1 <i>Audit Strategy Memorandum</i>
2. Menentukan dan menggunakan materialitas	<i>a. The Entity's Business</i>
3. Diskusi tim audit	<i>b. Reporting Objective, Timing of the Audit and Communications Required</i>
4. Mengidentifikasi resiko bawaan	<i>c. Direction of the Audit</i>
5. Menilai Resiko Bawaan	2. E-2 <i>Audit Planning Memorandum</i>
6. Resiko signifikan	<i>a. Intended Scope of Audit Work</i>
7. Memahami penegndalian internal	<i>b. Commercial and Financial Environment</i>
8. Mengevaluasi pengendalian internal	<i>c. Overall Approach to Components of Financial Statement</i>
9. Mengkomunikasikan kelemahan pengendalian internal	<i>d. Analytical Review</i>
10. Menyelesaikan tahap penilaian resiko	<i>e. Materilaity Indicators</i>
	<i>f. Overall Audit Approach Planned</i>
	<i>g. Sampling and Selection</i>

	<p><i>Approach</i></p> <p><i>h. Staffing on Assignment</i></p> <p><i>i. Overall Audit Approach by Caption</i></p> <p><i>j. Assignment Timetable and Responsibility</i></p> <p>3. E-3 <i>Assessment of Fraud Risk</i></p> <p>4. E-4 <i>Audit Risk Assessment and Commentary</i></p> <p>5. E-5 <i>Planning and Performance Materiality</i></p>
--	--

Sumber: Olahan Peneliti

Perbandingan awal antara perencanaan audit menurut SPAP dengan perencanaan audit atas laporan keuangan yang dibuat oleh KAP XXX sudah sesuai dengan SPAP, perbedaannya hanya terletak pada urutan pendokumentasiannya. Tetapi, didalam SPAP tidak menyebutkan bahwa perencanaan audit ini merupakan sesuatu yang berurutan, dalam SA 300 hanya disebutkan aktivitas-aktivitas yang harus dipenuhi dalam proses perencanaan audit. Oleh sebab itu, perbedaan urutan pendokumentasian antara perencanaan audit menurut SPAP dengan perencanaan audit atas laporan keuangan pada KAP XXX tidak dapat dikatakan menjadi suatu kesalahan.

Setelah mengetahui bagaimana perbandingan awal dari perencanaan audit pada KAP dengan perencanaan audit menurut SPAP, maka selanjutnya akan dilakukan analisis yang lebih rinci bagaimana perencanaan audit tersebut. Analisis perbandingan ini akan dilakukan dengan menggunakan perencanaan audit menurut SPAP sebagai acuan, sehingga dapat diperlihatkan bagaimana tingkat kesesuaian perencanaan audit pada KAP terhadap perencanaan audit menurut SPAP.

1. Analisis Strategi Audit Menyeluruh

Pada tahap pertama perencanaan audit menurut SPAP, auditor wajib untuk menyusun audit menyeluruh. SA 300 alinea 7 (2013) menyatakan bahwa strategi audit menyeluruh berisikan lingkup, pengaturan waktu, luas sumber daya, dan arahan audit yang akan dijadikan bahan pertimbangan dalam melakukan perencanaan audit.

Perencanaan audit pada KAP, lingkup audit terdapat pada bagian *intended scope of audit work* pada indeks E-2 *Audit Planning Memorandum*. Pengaturan waktu sudah dilakukan pada *time table* pada bagian *assignment timetable and responsibility* pada indeks E-2 *Audit Planning Memorandum*. Luas sumberdaya dilakukan pada bagian *staffing on assignment* pada indeks E-2 *Audit Planning Memorandum*. Arahan audit sudah didokumentasikan pada bagian *direction of the audit* pada indeks E-1 *Audit Strategy Memorandum*.

Operasional yang terjadi pada Koperasi Simpan Pinjam, lingkup audit sudah dijelaskan pada bagian karakteristik perikatan. Pengaturan waktu sudah dilakukan pada tahap *time table* pada bagian tujuan, pelaporan saat audit, dan sifat komunikasi. Luas sumberdaya sudah dilakukan pada bagian *staffing*. Arahan audit sudah dilakukan pada bagian arahan audit.

Berdasarkan hasil analisis yang telah dijelaskan di atas, maka perencanaan audit pada tahap pertama ini sudah dilakukan oleh KAP sesuai dengan SPAP.

2. Analisis Menentukan dan Menggunakan Materialitas

Tahap kedua dalam perencanaan audit menurut SPAP, auditor wajib untuk menentukan materialitas. SA 320 alinea 11 (2013) menyatakan bahwa auditor wajib untuk menetapkan besarnya *performance materiality* dengan tujuan untuk menilai resiko salah saji material dan menentukan sifat,

waktu, dan luasnya prosedur audit selanjutnya. SA alinea 12 (2013) juga menyatakan bahwa auditor wajib melakukan revisi materialitas untuk laporan keuangan secara keseluruhan dan materialitas untuk tingkat jenis transaksi, saldo akun, atau *disclosure* tertentu apabila diperlukan, saat mendapatkan informasi selama audit yang menyebabkan auditor menentukan angka materialitas yang berbeda dari yang sudah ditentukan sebelumnya.

Secara rinci KAP sudah mendokumentasikan penentuan materialitas pada bagian *materiality indicators* pada indeks E-2 *Audit Planning Memorandum* dan dijelaskan secara lebih rinci pada indeks E-5 *Planning and Performance Materiality*. Dokumentasi materialitas menurut desain perencanaan audit pada KAP sudah mencakup tujuan menurut SA 320 alinea 11 yaitu untuk menentukan sifat, waktu, dan luasnya prosedur audit selanjutnya.

Operasional yang terjadi pada Koperasi Simpan Pinjam, *preliminary materiality* ditentukan berdasarkan saldo interim pada Koperasi Simpan Pinjam periode September 2018. Maka dari itu, revisi materialitas sebagaimana yang telah dijelaskan dalam SA 320 alinea 12, akan dilakukan dengan merevisi jumlah materialitas dari saldo 30 September sampai dengan 31 Desember 2018. Jumlah materialitas diambil berdasarkan saldo pendapatan 31 Desember yang bertujuan untuk menentukan materialitas untuk pengujian substantif, dan jumlah materialitas revisi akan didokumentasikan pada *working paper* per akun. Perubahan dalam penggunaan basis penentuan materialitas juga mungkin dapat terjadi apabila saldo pendapatan yang digunakan sebagai basis perhitungan dalam *preliminary materiality* berubah signifikan dari tanggal interim laporan keuangan sampai dengan tanggal akhir tahun.

Berdasarkan hasil analisis yang telah dijelaskan, maka pada tahap ini dapat disimpulkan bahwa perencanaan audit pada KAP sudah sesuai dengan SPAP.

3. Analisis Diskusi Tim

Pada tahap ketiga perencanaan audit menurut SPAP, SA 240 alinea 15 (2013) menyatakan bahwa tim penugasan auditor wajib melakukan diskusi dengan partner untuk member penekanan tentang bagaimana dan dimana laporan keuangan klien rentan terhadap salah saji material karena kecurangan, termasuk bagaimana kecurangan tersebut dapat terjadi. Selain itu, diskusi ini juga bertujuan agar auditor dapat memahami klien secara lebih detail misalnya mengenai bisnis klien, manajemen klien, resiko klien, dan hal lainnya. Pengetahuan pada setiap auditor terhadap klien dapat berbeda-beda, maka dari itu dengan dilakukannya diskusi ini dapat menyetarakan informasi antara tim penugasan.

Berdasarkan desain perencanaan audit pada KAP, diskusi tim audit akan dijelaskan secara lebih rinci pada indeks E-1 *Audit Strategy Memorandum* pada bagian *Direction of the Audit* yang menyebutkan bahwa selama perikatan harus melakukan diskusi mengenai pengendalian internal dan informasi mengenai klien.

Berdasarkan operasionalnya, diskusi tim audit sudah dilakukan pada wal sebelum melakukan proses audit pada Koperasi Simpan Pinjam. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Rahmi, diskusi tim audit selalu dilakukan pada saat melakukan pemeriksaan dan pada saat laporan telah dibuat.

Berdasarkan hasil analisis yang sudah dijelaskan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perencanaan audit pada KAP sudah sesuai dengan SPAP.

4. Analisis Mengidentifikasi Resiko Bawaan

Pada tahap keempat dalam perencanaan audit menurut SPAP, SA 240 alinea 10 (2013) menyatakan bahwa tujuan auditor adalah untuk mengidentifikasi dan menilai resiko salah saji material pada laporan keuangan yang disebabkan oleh kecurangan. Salah satu caranya yaitu dengan melakukan identifikasi resiko bawaan untuk menilai apakah terdapat indikasi kecurangan. Berdasarkan SA 240 alinea 12 (2013) menyatakan bahwa auditor wajib untuk mempertahankan skeptisme profesional sepanjang audit, hal ini harus dipertahankan karena menyadari kemungkinan akan terjadinya salah saji material yang disebabkan oleh kecurangan.

Pada desain perencanaan laporan keuangan pada KAP XXX, mengidentifikasi resiko kecurangan terdapat pada indeks E-3 *Assessment of Fraud Risk*. Mengidentifikasi resiko bawaan terdapat pada *significant audit risks* pada bagian *intended audit scope* pada indeks E-2 *Audit Planning Memorandum*. Selanjutnya, resiko bawaan yang ditentukan bersama dengan resiko pengendalian akan digunakan sebagai dasar dalam perhitungan resiko signifikan. Resiko bawaan yang sudah dinilai dalam tingkat *low*, *medium*, atau *high* menjadi dasar dalam menentukan jumlah sampel bersamaan dengan penentuan resiko pengendalian. Sedangkan, berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Rahmi, kemungkinan terjadinya kecurangan masih ada tetapi sangat kecil.

Berdasarkan hasil analisis yang dijelaskan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perencanaan audit pada KAP sudah sesuai dengan SPAP.

5. Analisis Menilai Resiko Bawaan

Berdasarkan SA 240 alinea 25 (2013) menyatakan bahwa sesuai dengan SA 315, auditor wajib untuk mengidentifikasi dan menilai resiko salah saji material karena kecurangan pada tingkat laporan keuangan dan pada

tingkat asersi untuk jenis transaksi, saldo akun, dan pengungkapan. SA 240 alinea 27 (2013) juga menyatakan bahwa auditor wajib untuk menilai resiko salah saji material akibat kecurangan sebagai resiko yang signifikan, jika menentukan resiko signifikan belum dilakukan, auditor wajib memperoleh pemahaman tentang pengendalian entitas yang terkait, termasuk kegiatan dalam pengendalian yang berkenaan dengan resiko tersebut.

Berdasarkan dokumentasi perencanaan audit pada KAP, tahap identifikasi dan menilai resiko bawaan, resiko pengendalian dan resiko akibat kecurangan dilakukan pada tahap yang bersamaan. Setelah mengidentifikasi resiko tersebut, maka selanjutnya resiko dinilai apakah resiko tersebut termasuk resiko signifikan. Menilai resiko bawaan terdapat pada *significant audit risks* pada bagian *intended audit scope* pada indeks E-2 *Audit Planning Memorandum*. Selanjutnya, resiko bawaan yang ditentukan bersama dengan resiko pengendalian akan digunakan sebagai dasar dalam perhitungan resiko signifikan. Resiko bawaan yang sudah dinilai dalam tingkat *low*, *medium*, atau *high* menjadi dasar dalam menentukan jumlah sampel bersamaan dengan penentuan resiko pengendalian. Sedangkan dalam operasional menilai resiko bawaan dilakukan oleh Koperasi Simoan Pinjam pada identifikasi resiko pada tahap arahan audit.

Berdasarkan hasil analisis yang dijelaskan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perencanaan audit pada KAP sudah sesuai dengan SPAP.

6. Analisis Resiko Signifikan

Berdasarkan SA 315 alinea 27 (2013) menyatakan bahwa auditor wajib untuk menentukan apakah resiko yang diidentifikasi adalah resiko signifikan. Berdasarkan *judgement auditor*, menentukan resiko signifikan

delakukan dengan cara mengenyampingkan dampak pengendalian yang diidentifikasi terkait resiko tersebut. SA 315 alinea 21 (2013) juga menyatakan bahwa jika resiko signifikan sudah ditentukan, auditor wajib untuk melaksanakan prosedur substantive yang khusus maupun prosedur wajib uji rincian untuk melengkapi resiko tersebut.

Analisis resiko signifikan dilakukan pada *significant audit risks* pada bagian *intended audit scope*. Selain pada bagian *significant audit risks*, penilaian resiko signifikan juga dilakukan pada bagian *Commercial and Financial Environment, overall approach to components of financial statement, analytical review* pada indeks E-2 *Audit Planning Memorandum*, indeks E-3 *Assessment of Fraud Risk* dan indek E-4 *Audit Risk Assessment and Commentary*.

Area signifikan yang dinilai pada tahap penilaian resiko kecurangan biasanya terletak pada pengakuan pendapatan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Rahmi, pada akun pendapatan belum tentu memiliki resiko yang tinggi tetapi dapat dilihat juga pada usahanya, tetapi kemungkinan beresiko karena banyaknya keterkaitan pendpatan dengan akun-akun lain, sehingga resiko nya dapat dibilang tinggi.

Operasional dalam dokumentasi perencanaan audit laporan keuangan pada Koperasi Simpan Pinjam, penentuan resiko signifikan sudah dilakukan pada tahap arahan audit. Dokumentasi dan pelaksanaan perencanaan audit sudah sesuai dengan SA 315 alinea 21 yang telah disampaikan di atas.

Berdasarkan hasil analisis yang dijelaskan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perencanaan audit pada KAP sudah sesuai dengan SPAP.

7. Analisis Memahami Pengendalian Internal

Berdasarkan SA 315 alinea 20 (2013) menyatakan bahwa auditor wajib untuk memperoleh pemahaman mengenai kegiatan pengendalian yang relevan untuk auditnya, yaitu pengendalian yang dipandang auditor adalah penting untuk menilai resiko salah saji material pada tingkat asersi, dan merancang prosedur audit lanjutan untuk menanggapi resiko tersebut. Pada suatu audit tidak mewajibkan pemahaman semua kegiatan pengendalian yang berkenaan dengan jenis transaksi, saldo akun, dan *disclosure* yang penting dalam laporan keuangan atau mengenai setiap asersi.

Berdasarkan desain perencanaan audit pada KAP, tahap memahami pengendalian internal dilakukan pada bagian *commercial and financial environment* pada indeks E-2 *Audit Planning Memorandum*. Pada tahap *commercial and financial environment* auditor dituntut untuk dapat memahami bisnis klien dan pengendalian internal klien. Pengendalian internal seperti penggunaan akuntansi berbasis Teknologi Informasi juga dapat diidentifikasi sebagai salah satu cara memahami pengendalian internal terhadap laporan keuangan yang dihasilkan atas sistem tersebut.

Berdasarkan dokumentasi pada Koperasi Simpan Pinjam tahap memahami pengendalian internal dilakukan pada pendekatan audit dalam tahap arahan audit. Pemahaman tentang pengendalian internal didokumentasikan sekaligus melakukan penilaian atas pengendalian tersebut. Sedangkan pada operasional nya, memahami pengendalian internal dilakukan auditor dengan cara melaksanakan audit di Koperasi Simpan Pinjam. Pada proses pelaksanaan audit pada Koperasi Simpan Pinjam, auditor dapat memahami pengendalian internal dengan cara mempelajari Satuan Operasional Prosedur (SOP) pada perusahaan. Proses dalam mengunjungi tempat klien membuktikan bahwa proses pemahaman pengendalian internal tidak cukup pada tahap perencanaan audit saja, tetapi juga dilakukan dengan cara terus menerus selama pelaksanaan audit berlangsung.

Berdasarkan hasil analisis, observasi, dan kesesuaian tahap perencanaan audit maka dapat disimpulkan bahwa tahap ini juga sudah sesuai dengan SPAP.

8. Analisis Mengevaluasi Pengendalian Internal

Berdasarkan SA 265 alinea 9 (2013) menyatakan bahwa dalam memperoleh pengendalian yang relevan dengan audit, auditor wajib melakukan evaluasi rancangan dari pengendalian tersebut dan menentuka apakah pengendalian tersebut sudah diimplementasi.

KAP melakukan evaluasi pengendalian internal kliennya dengan cara menganalisis sesuai dengan kearifan professional auditor dan didokumentasikan pada *commercial and financial environment* pada indeks E-3 *Assessment of Fraud Risk*. Pada bagian *commercial and financial environment* selain disebutkan pengendalian internal yang dilakukan oleh klien, dijelaskan juga analisis atas pengendalian tersebut dan dampaknya terhadap penurunan resiko audit.

Berdasarkan dokumentasi perencanaan audit pada Koperasi Simpan Pinjam, auditor melakukan evaluasi pengendalian internal pada pendekatan audit pada tahap arahan audit. Selama pelaksanaan audit berlangsung, auditor akan memperoleh pemahaman atas pengendalian internal yang ada pada Koperasi Simpan Pinjam dengan cara meminta keterangan kepada anggota klien apakah pengendalian tertentu sudah dilakukan, menguji dokumen dan catatan klien, mengamati aktivitas dan operasi klien, dan menggunakan pengalaman tahun sebelumnya dengan cara mempelajari *working paper* pada Koperasi Simpan Pinjam tahun lalu. Hasil dari *test of control* akan didokumentasikan pada *working paper* setiap akun.

Pengujian terhadap pengendalian internal bertujuan untuk mengurangi resiko bawaan dan resiko signifikan yang sudah ditentukan sebelumnya, dan jika pengendalian internal baik maka akan menghasilkan resiko pengendalian yang rendah. Hasil dari mengevaluasi pengendalian ini akan berdampak pada sifat (*nature*), saat (*timing*), dan luas (*extent*) sampel atau bukti audit yang akan dikumpulkan oleh auditor dalam pengujian substantif.

Berdasarkan hasil analisis dan informasi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perencanaan audit pada KAP sudah sesuai dengan SPAP.

9. Analisis Mengkomunikasikan Kelemahan Pengendalian Internal

Berdasarkan SA 315 alinea 26 (2013) menyatakan bahwa auditor wajib untuk mengidentifikasi resiko bawaan, resiko pengendalian, dan dengan mempertimbangkan jenis transaksi, saldo akun, dan pengungkapan dalam laporan keuangan, serta menilai resiko yang diidentifikasi, dan mengevaluasi apakah resiko tersebut lebih berkaitan secara pervasive dengan laporan keuangan secara keseluruhan dan secara potensial memengaruhi banyak asersi. Hasil dari analisis ini akan menjadi dasar untuk merancang prosedur audit selanjutnya. Tahap pada penilaian resiko akan menghasilkan resiko salah saji material yang didapat dengan mempertimbangkan resiko bawaan dengan adanya pengendalian internal yang sudah dinilai pada tahap sebelumnya.

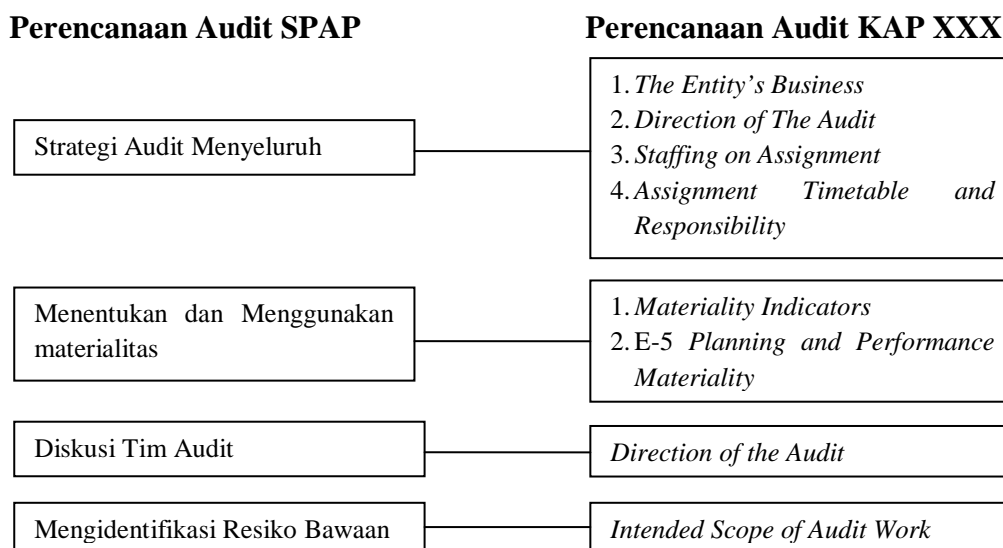
Berdasarkan desain perencanaan audit pada KAP, tahap ini didokumentasikan pada *Overall Audit Approach By Caption, Overall Audit Approach* dan ditentukan juga sampel dengan melengkapi bagian pada *Sampling and Selection Approches Planned* pada indeks E-2 *Audit Planning Memorandum*. Sedangkan berdasarkan perencanaan audit laporan keuangan pada Koperasi Simpan Pinjam tahap ini ada pada tahap kedelapan yaitu pendekatan audit per area.

Berdasarkan hasil analisis diatas, pada tahap terakhir ini perencanaan audit atas laporan keuangan pada KAP sudah sesuai dengan SPAP.

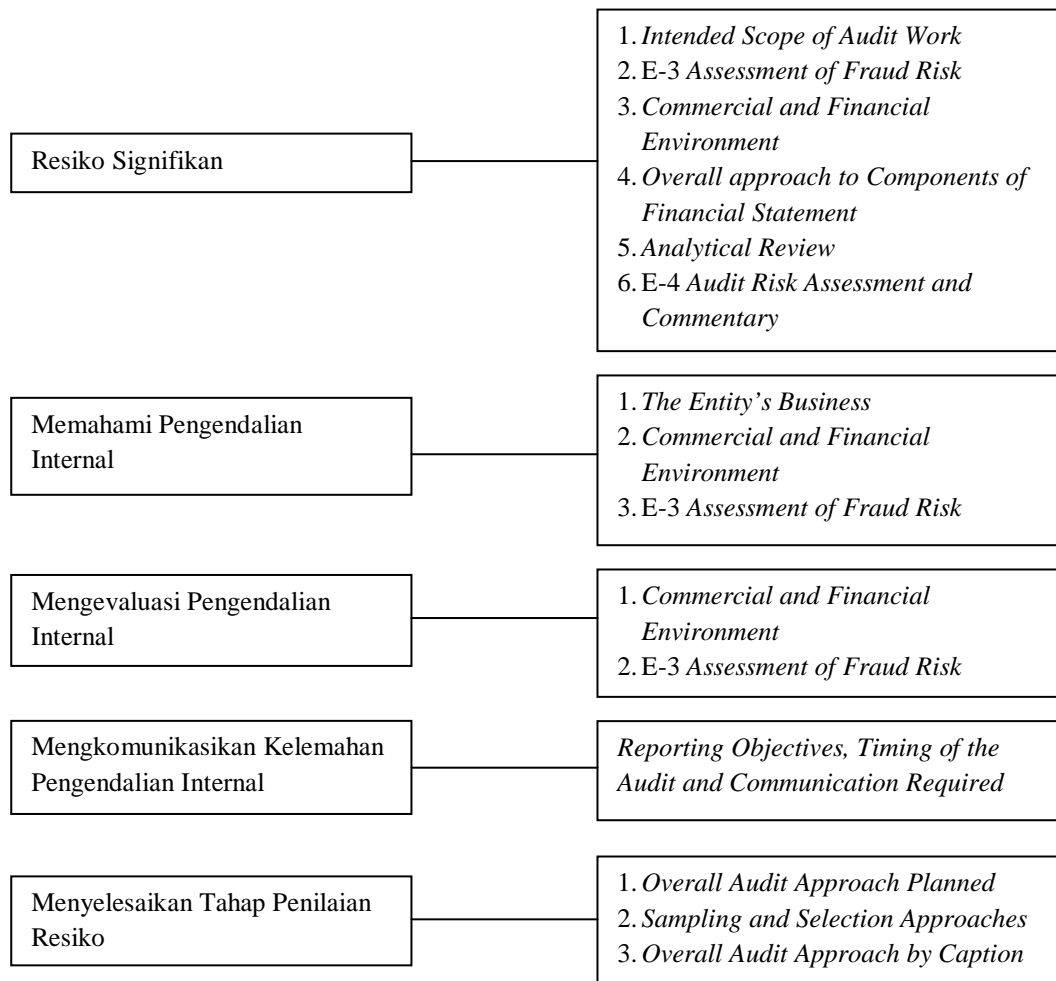
Berdasarkan SA 300 yang menyatakan bahwa perencanaan audit merupakan aktivitas-aktivitas yang harus dipenuhi dalam melakukan proses perencanaan audit, tidak menyatakan penegasan urutan dalam pendokumentasian perencanaan audit. Oleh karena itu, perbedaan dalam urutan pendokumentasian perencanaan audit atas laporan keuangan pada KAP XXX dengan SPAP tidak dapat dikatakan menjadi suatu kesalahan. Berikut ini gambar 4.2 akan merangkum hasil pembahasan perbandingan antara perencanaan audit menurut SPAP dengan perencanaan audit berdasarkan desain KAP XXX.

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan secara keseluruhan perencanaan audit atas laporan keuangan berdasarkan desain maupun operasional pada Koperasi Simpan Pinjam sudah sesuai dengan SPAP.

Gambar 4.2
Ringkasan Pembahasan



Lanjut ke halaman berikutnya



Sumber: Olahan Peneliti

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui kesesuaian perencanaan audit atas laporan keuangan pada KAP XXX terhadap desain dan perencanaan audit atas laporan keuangan menurut SPAP. Objek pada penelitian ini yaitu Kantor Akuntan Publik XXX. Berdasarkan hasil analisis yang sudah dilakukan, hasil penelitian dan pembahasan tentang perencanaan audit atas laporan keuangan pada KAP XXX dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Operasional perencanaan audit atas laporan keuangan yang dilakukan oleh KAP XXX telah sesuai dengan desain perencanaan yang telah dibuat oleh KAP XXX.
2. Perencanaan audit yang telah dilakukan oleh KAP XXX sudah mengikuti standar yang berlaku yaitu SPAP.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Peneliti menyadari bahwa pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki oleh peneliti sangat terbatas baik secara teoritis maupun secara praktisi. Keterbatasan yang dialami peneliti dalam melakukan penelitian ini, yaitu:

1. Jumlah data yang digunakan dalam melakukan analisis kesesuaian operasional terhadap desain perencanaan yang telah dibuat oleh KAP XXX masih sangat terbatas.
2. Kurangnya literatur yang relevan di dalam melakukan penelitian ini.

5.3 Saran

Peneliti menyadari bahwa pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki oleh peneliti sangat terbatas baik secara teoritis maupun secara praktisi. Penelitian yang akan dilakukan dimasa mendatang diharapkan dapat menyajikan hasil penelitian yang lebih berkualitas dengan beberapa masukan tentang beberapa hal, yaitu:

1. Peneliti selanjutnya diharapkan untuk dapat menambah literatur yang relevan lebih banyak sesuai dengan topik penelitian.

2. Peneliti selanjutnya yang tertarik dengan topik yang sama sebaiknya dapat menambahkan *sampling* penelitian perencanaan audit, sehingga akan menghasilkan hasil penelitian yang lebih variatif dan dapat menyempurnakan wawancara peneliti selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhi Yudho Pradipto, Agustinus. 2019. Analisis Perencanaan Audit Laporan Keuangan Pada Kantor Akuntan Publik (KAP) Joachim Sulisty & Rekan. Yogyakarta
- Ginting, Evan Dinata. 2017. Analisa Perencanaan Audit atas Laporan Keuangan pada Kantor Akuntan Publik Richard Risambessy dan Rekan. Skripsi Universitas Katholik Parahyangan Bandung.
- Fachruddin, Wan, Syamsul Bahri, and Angelia Pribadi. 2019. Analisis Faktor Yang Memengaruhi Kualitas Audit dengan Prosedur Audit sebagai Pemediasi. *Jurnal Ilman: Jurnal Ilmu Management* 5.2.
- Larasati, Adinda Rizky, and Hery Laksito. 2019. Pengaruh Kompetensi Auditor Terhadap Perencanaan Audit dengan Dimoderisasi Pemahaman Teknologi Informasi (Studi Empiris pada Auditor KAP di Semarang)
- Risma, Desi. 2019. Pengaruh Kompetensi, Independensi, Time Budget Pressure dan Audit Fee terhadap Kualitas Audit pada Kantor Akuntan Publik di Kota Medan.
- Fransisco, Fransisco, et al. 2019. Pengaruh Kompetensi, Independensi, dan Tekanan Waktu terhadap Kemampuan Auditor Mendeteksi Kecurangan dengan Skeptosme Profesional sebagai Variabel Intervening. *Prosiding Seminar Nasional Pakar*.
- Kurnia, Digna Elvina. 2019. Faktor-Faktor yang Berpengaruh terhadap Kinerja Auditor. *Prosiding FRIMA (Festival Riset Ilmiah Manajemen dan Akuntansi)* 2:211-219.
- Agoes, S. 2012. *Auditing Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik*. Jakarta: Salemba Empat.

- Dwimilten, E., & Riduan, A. 2015. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Audit*. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi Vol. 4 No. 4.
- Institut Akuntan Publik Indonesia. 2013. *Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Arens, A. A., Randal, E. J., & Beasley, M. S. 2015. *Auditing dan Jasa Asuransi Pendekatan Terintegrasi Jilid 1 Edisi 15*. Jakarta: Erlangga.
- Handayani, D. 2019. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Audit*. Widya Warta No 02 Tahun XXX III.
- Hidayat, M. 2011. *Peranan Audit Intern sebagai Strategic Business Partner di PT. Pertani (Persero) Wilayah Sumatera Bagian Selatan*. Jurnal Ekonomi dan Informasi Akuntansi Vol.1 No.1.
- Supomo, B., & Indriantoro, N. 2002. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Yogyakarta: Penerbit BFEE UGM.
- Tuanakotta, T. M. 2014. *Audit Berbasis ISA (International Standards on Auditing)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Utami, D. P. 2014. *Evaluasi Perencanaan Audit Laporan Keuangan pada Kantor Akuntan Publik Achmad Rasyid, Hisbullah & Jerry (KAP ARHJ)*. E-Journal Universitas Bina Nusantara.

BERITA ACARA WAWANCARA

Pada hari ini,

Telah dilaksanakan wawancara yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan untuk memenuhi Tugas Akhir Diploma 3 (D3) Akuntansi.

Tempat :

Nama Narasumber :

Pihak pewawancara melakukan wawancara dengan pihak narasumber yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan di KAP, kemudian narasumber memberikan jawaban terkait pertanyaan yang diajukan oleh pewawancara. Adapun pertanyaan yang diajukan serta hasil wawancara terlampir.

Bandar Lampung, 24 Juli 2019

Peneliti

Narasumber

Deby Shinta Elvia Putri

Rahmi Aulia

NPM. 1602130017

Auditor

PERTANYAAN WAWANCARA

1. Apa basis dalam penyusunan Perencanaan Audit Laporan Keuangan?

Jawaban:

KAP sudah memiliki standar perencanaan masing-masing yang sesuai dengan peraturan organisasi, peraturan Kementerian Keuangan bahwa setiap KAP wajib mempunyai standar penerimaan perencanaan audit.

2. Bagaimana proses penerimaan perikatan perikatan pada klien?

Jawaban:

Proses pertama mendapat surat permintaan dari klien atau calon klien, selanjutnya setelah melakukan komunikasi kita melakukan survey pendahuluan atau survey lapangan seperti mendatangi perusahaan untuk melihat kesiapan data-datanya, kemudian setelah kita lihat cukup memadai bisa dilakukan pemeriksaan audit dan akan diterima sebagai klien.

3. Dalam perencanaan audit, terdapat tahapan mengidentifikasi resiko bawaan, resiko pengendalian, dan resiko signifikan. Bagaimana itu mengidentifikasi, menilai dan mendokumentasikannya?

Jawaban:

Mengidentifikasi dilihat dari Laporan Keuangan, pada saat survey pendahuluan sudah dilakukan wawancara yang dilakukan dengan pihak manajemen yang berkaitan langsung dengan pelaporan akuntansinya. Jadi, pada saat wawancara kita akan menilai akun-akun mana saja yang memiliki resiko yang besar. Pada saat wawancara biasanya kami selalu menanyakan bagaimana usahanya dan apa saja kendala yang mereka hadapi. Dari situ kita bisa menilai akun mana yang berintegritas dengan masalah yang mereka hadapi. Selain itu, akan dilihat dari perbandingan Laporan Keuangan, akun-akun mana yang memiliki kecenderungan naik yang signifikan dan akun-akun mana yang memiliki kecenderungan turun yang signifikan.

Mendokumentasikannya sudah ada dari Kementerian Keuangan, mereka sudah memiliki *tools* nya dan sudah dipakai saat ini. Sebelum itu, kami memiliki perangkat modulnya tersendiri, dari mulai penerimaan, survey lapangan, dan di dokumentasikan dengan memasukkan nya ke dalam kertas kerja.

4. Bagaimana proses penentuan materialitas untuk perikatan dengan klien?

Jawaban:

Materialitas itu sudah mempunyai peraturan tersendiri jadi kita memiliki perkiraan, misalnya materialitas itu diambil dari mana dan ada berapa macam.

Ada 4 katagori materialitas yaitu dari total aset, total pendapatan, total ekuitas dan laba sebelum pajak. Setelah kita melakukan identifikasi resiko, kita akan melihat akun mana yang berdampak memiliki resiko yang tinggi. Selanjutnya, setelah ditentukan materialitas secara keseluruhan kita akan menentukan materialitas performance atau *income sheet* per akun, jadi ditentukan lagi per akunnya misalnya kas berapa persen dan piutang berapa persen. Selanjutnya materialitas spesial atau materialitas khusus, misalnya mengidentifikasi resiko yang tinggi di akun piutang, dan akan kita masukkan materialitasnya mau berapa persen.

5. Bagaimana proses *staffing* untuk perikatan dengan klien?

Jawaban:

Kita sudah mempunyai jadwal auditor-auditor yang sedang turun kelapangan atau yang sedang mengerjakan KKP. Kemudian kita lihat dari kemampuannya, misalnya auditor sudah memiliki pengalaman audit dimana dan di lihat juga apakah sudah pernah mengikuti pelatihan materi tersebut atau belum.

6. Bagaimana apabila ditengah perikatan, terdapat kekurangan tenaga professional?

Jawaban:

Selama ini, kami tidak pernah mengalami masalah itu karena sudah dilakukan perencanaan di awal dan dilakukan diskusi tim jadi kami tidak pernah mengalami kekurangan tim saat ditengah perikatan.

7. Apakah kegunaan penyajian asersi manajemen dalam perencanaan audit atas laporan keuangan?

Jawaban:

Semua laporan keuangan disusun oleh manajemen jadi jika terdapat kesalahan penyajian dan pelaporan itu semua tanggung jawab manajemen, jadi jika terdapat kekeliruan, kesalahan saji akan dilaporkan terlebih dahulu kepada pihak manajemen apakah setuju atau tidak untuk di koreksi selanjutnya akan menjadi tanggung jawab manajemen.

8. Mengapa pengakuan pendapatan menjadi hal yang memiliki resiko signifikan?

Jawaban:

Sebenarnya dilihat juga dari usahanya, belum tentu pendapatannya beresiko, tetapi kemungkinan beresiko itu karena banyaknya keterkaitan pendapatan dengan akun-akun lain, bisa jadi dengan piutang atau pajak maka dari itu resiko nya dibilang tinggi.

9. Apakah tujuan penyajian pendekatan audit per area dalam perencanaan audit Laporan Keuangan pada klien?

Jawaban:

Untuk mengidentifikasi salah saji pada akun-akun tersebut bisa kita lakukan koreksi atau tidak, jika salah sajinnya signifikan melebihi batas materialitas maka akan mempengaruhi opini.

10. Dalam SPAP dan perencanaan audit KAP yang ditelaah, apakah terdapat tahap atau langkah diskusi tim audit dalam perencanaan audit pada klien?

Jawaban:

Diskusi tim pasti ada jadi setiap kali kita melakukan pemeriksaan, setelah laporan di buat biasanya kita ajukan dulu ke klien atau perusahaan. Setelah mereka baca, ada atau tidaknya yang mereka tidak setuju akan dikomunikasikan dengan cara diskusi karena akan menyangkut opini tersebut.

11. Bagaimana komunikasi dengan pengendalian internal? Apakah di dokumentasikan atau tidak? Mengapa?

Jawaban:

Di awal sudah di dokumentasikan, biasanya kita lihat dari SPI yang berhubungan dengan identifikasi resiko, karena berhubungan maka akan kita lihat apakah sistem nya lemah atau tidak. Jika lemah perlu tidak kita telaah lebih jauh, jika kuat perlu atau tidak kita ambil sampel dari SPI tersebut, dari situlah kita lakukan penilaian dan di dokumentasikan. Untuk SPI nya sendiri kami menilai berdasarkan KAP, setelah hasilnya di dokumentasikan selanjutnya kita lihat apakah berhubungan dengan cara penyajian mereka, akuntansi dan laporan keuangannya.